

**Identifikasi dan peranan sektor pertanian dalam pembangunan wilayah di
kabupaten kodus**

Skripsi

**Untuk memenuhi sebagai persyaratan
guna memperoleh derajat Sarjana Pertanian
di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret**

**Jurusan/Program Studi
Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis**



Oleh :

Linda Saraswati

H.0302062

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2008

HALAMAN PENGESAHAN

**IDENTIFIKASI DAN PERANAN SEKTOR PERTANIAN DALAM
PEMBANGUNAN WILAYAH DI KABUPATEN KUDUS**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

LINDA SARASWATI

H0302062

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

pada tanggal : Juli 2008

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Ketua

Anggota I

Anggota II

Ir. Ropingi, MSi

NIP. 131 943 615

Ir. Agustono, MSi

NIP. 131 884 419

Wiwit Rahayu, SP, MP

NIP. 132 173 134

Surakarta, Juli 2008

Mengetahui,

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Fakultas Pertanian

Dekan

Prof. Dr. Ir. H. Suntoro, MS

NIP. 131 124 609

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhaanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

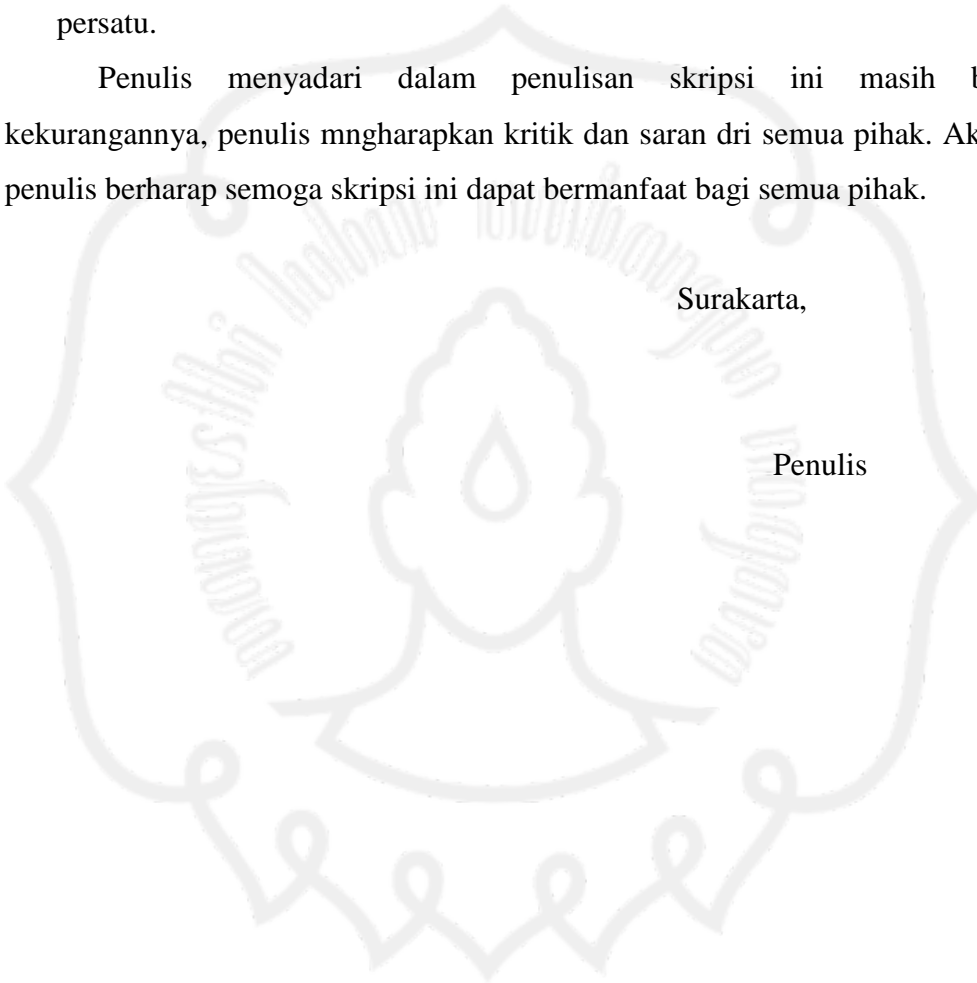
1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Suntoro, M.S selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Ir. Catur Tunggal BJP, M.S selaku Ketua Jurusan/ Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian/ Agrobisnis Fakultas Pertanian Universitas sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Ir. Ropingi, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ir. Agustono, M.Si selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
5. Ibu Wiwit Rahayu, SP, MP selaku Dosen Penguji Tamu atas masukan dan kesediannya menjadi penguji.
6. Seluruh Dosen Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus beserta staf, Kepala BAPPEDA Kabupaten Kudus beserta staf, Kepala Kesbanglinmas Kabupaten Kudus beserta staf, dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kudus beserta stafnya yang telah memberikan bantuan.
8. Bapak, Ibu dan adik tercinta "Dhian" atas doa, kasih sayang, dukungan dan segala kepercayaan yang diberikan.
9. Andrianto Tiwut Nugroho " Endut" atas segala dukungan, perhatian, kesabaran dan kasih sayangnya...
10. Teman-teman Agrobisnis 2002 atas kerjasama, dukungan dan kekeluargaan kita.....

11. Teman-teman Ekstensi “Mas Gigih, Mas Nova, Mas Andi” atas kerjasamanya.
12. Teman-teman kost Green House “Dwel, Itoo, Ika, Citra, Wahyu, Ambar, Ega, Desty, Dyani, Tiwi, Ismi, Anggra, Nita, Firda, Icim, Nana, Nuke, Dewi” dan semua anak-anak Suwondo atas dukungan dan persaudaraan kita.
13. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, penulis mngharapkan kritik dan saran dri semua pihak. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta,

Penulis



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN	xiii
SUMMARY	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	5
A. Penelitian Terdahulu	5
B. Tinjauan Pustaka	7
1. Pembangunan.....	7
2. Pembangunan Ekonomi	8
3. Pembangunan Ekonomi Daerah.....	9
4. Otonomi Daerah.....	9
5. Pembangunan Pertanian.....	11
6. Peranan Sektor Pertanian dalam Perekonomian	12
7. Teori Ekonomi Basis.....	13
C. Kerangka Teori Pendekatan Masalah.....	15
D. Asumsi-Asumsi.....	17
E. Pembatasan Masalah.....	17
F. Definisi Operasional dan Konsep Pengukuran Variabel	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Metode Dasar Penelitian	22
B. Metode Pengambilan Daerah Penelitian	22

	<i>Halaman</i>
	22
	23
BAB IV	27
A. Keadaan Umum.....	27
1. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi.....	27
2. Topografi.....	27
3. Jenis Tanah dan Pemanfaatan Lahan	28
4. Keadaan Iklim.....	29
B. Keadaan Penduduk	29
1. Jumlah dan Komposisi Penduduk.....	29
2. Ketenagakerjaan.....	31
C. Keadaan Perekonomian.....	32
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	32
2. Struktur Perekonomian	33
3. Pendapatan Perkapita.....	33
BAB V	35
A. Analisis <i>Location Quotient (LQ)</i>	35
1. Sektor Perekonomian.....	35
2. Sektor Pertanian	40
B. Analisis <i>Dynamic Location Quotient (DLQ)</i>	43
1. Sektor perekonomian	43
2. Sektor Pertanian	45
C. Analisis Identifikasi Sektor Pertanian dan Sub Sektor Pertanian Untuk Masa Sekarang dan Masa Depan	46
1. Sektor Perekonomian	47
2. Sektor Pertanian	49
D. Analisis Peranan Sektor Pertanian	51
1. Angka Pengganda Pendapatan.....	51
2. Angka pengganda tenaga Kerja	52
BAB VI	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR TABEL

<i>No</i>	<i>Judul</i>	<i>Halaman</i>
1	PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (Juta Rupiah).....	3
2	Luas Lahan Menurut Pemanfaatannya di Kabupaten Kudus Tahun 2004.....	28
3	Jumlah dan Komposisi Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2004 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	29
4	Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Kabupaten Kudus Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2004.....	30
5	Penduduk Kabupaten Kudus Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2000-2004.....	31
6	Penduduk (10 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Kudus Tahun 2004.....	31
7	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perekonomian Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (%)	32
8	Distribusi PDRB Kabupaten Kudus ADHK 1993 Tahun 2000-2004 (%).....	33
9	Pendapatan Perkapita Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004.....	34
10	Nilai <i>Location Quotient (LQ)</i> Sektor Perekonomian di Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004.....	36
11	Nilai <i>Location Quotient (LQ)</i> Sub Sektor Pertanian di Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004.....	40
12	Nilai <i>Dynamic Location Quotient (DLQ)</i> Sektor Perekonomian Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004	43
13	Nilai <i>Dynamic Location Quotient (DLQ)</i> Sub Sektor Pertanian Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004	45
14	Perubahan Posisi Sektor Perekonomian Kabupaten Kudus	47
15	Pengelompokan Sektor Perekonomian Berdasarkan Nilai LQ dan DLQ ...	48
16	Perubahan Posisi Sub Sektor Pertanian di Kabupaten Kudus.....	49
17	Pengelompokan Sektor Perekonomian Berdasarkan Nilai LQ dan DLQ...	50
18	Angka Pengganda Pendapatan dan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Perekonomian Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004.....	51
19	Angka Pengganda Tenaga Kerja dan Kontribusi Tenaga Kerja Sektor Pertanian terhadap Total Tenaga Kerja di Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004	52

DAFTAR GAMBAR

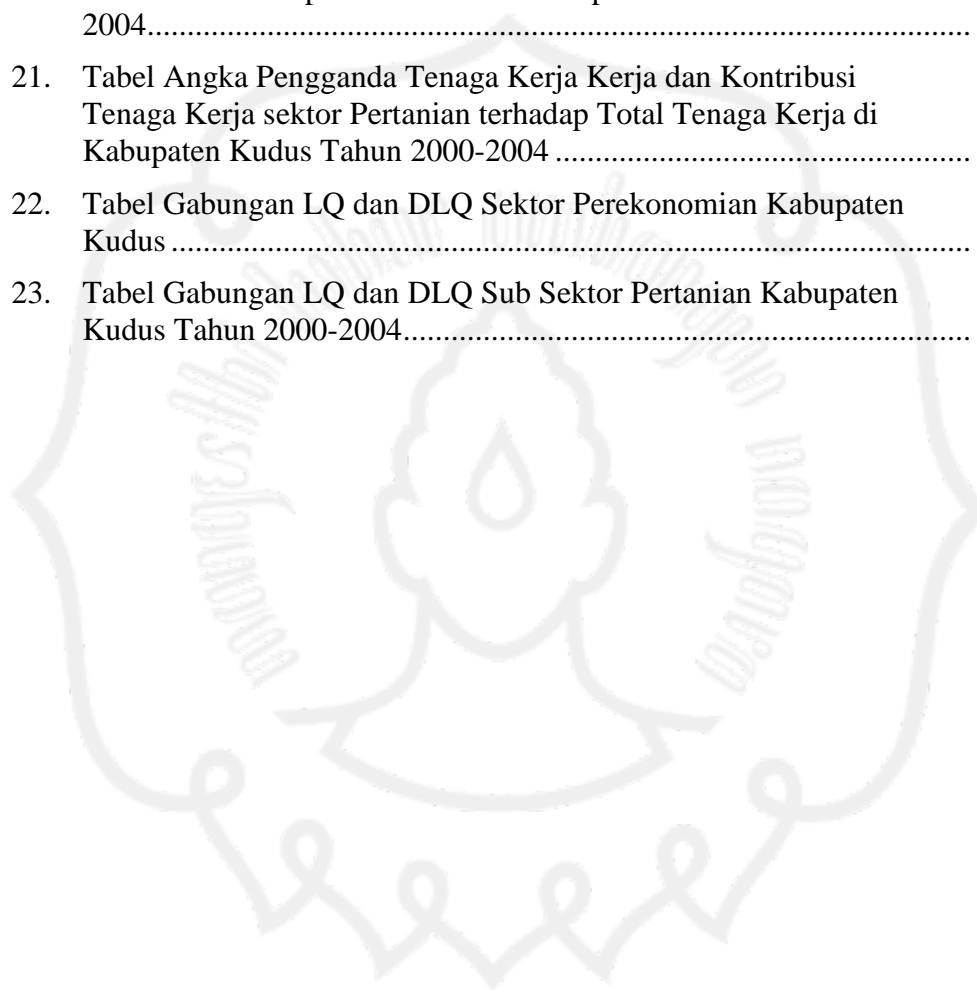
<i>No</i>	<i>Judul</i>	<i>Halaman</i>
1.	Skema Alur Penelitian Dalam Identifikasi dan Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Wilayah di Kabupaten Kudus.....	18
2.	Kerangka Teori Pendekatan Masalah untuk Menentukan Perubahan Posisi Sektor Pertanian di Kabupaten Kudus.....	19



DAFTAR LAMPIRAN

<i>No</i>	<i>Judul</i>	<i>Halaman</i>
1.	Tabel PDRB Kabupaten Kudus Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000-2004 (dalam jutaan rupiah).....	56
2.	Tabel Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004 (%).....	57
3.	Tabel PDRB Kabupaten Kudus Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 pada Tahun 2000-2004 (dalam jutaan rupiah).....	58
4.	Tabel PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 pada Tahun 2000-2004 (dalam jutaan rupiah).....	59
5.	Tabel Nilai LQ Sektor Perekonomian Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004	60
6.	Tabel PDRB Sub Sektor Pertanian Kabupaten Kudus ADHB Tahun 2000-2004 (dalam jutaan rupiah).....	61
7.	Tabel Indeks Harga Implisit Sub Sektor Pertanian Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004 (%).....	61
8.	Tabel PDRB Sub Sektor Pertanian Kabupaten Kudus ADHK 2000 pada Tahun 2000-2004 (dalam jutaan rupiah)	62
9.	Tabel PDRB Sub Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah ADHK 2000 pada Tahun 2000-2004 (dalam jutaan rupiah).....	62
10.	Tabel Nilai LQ Sub Sektor Pertanian Kabupaten Kudus.....	63
11.	Tabel Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus ADHB pada Tahun 2000-2004 (%)	64
12.	Tabel Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus ADHK 2000 pada Tahun 2000-2004 (%)	65
13.	Tabel Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2000 pada Tahun 2000-2004 (%)	66
14.	Tabel Nilai DLQ Sektor Perekonomian Kabupaten Kudus Tahun 200-2004	67
15.	Tabel Laju Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian Kabupaten Kudus ADHB pada Tahun 2000-2004	67
16.	Tabel Indeks Harga Implisit Sub Sektor Pertanian Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004.....	68
17.	Tabel Laju Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian Kabupaten Kudus ADHK 2000 pada Tahun 2000-2004 (%)	68

<i>No</i>	<i>Judul</i>	<i>Halaman</i>
18.	Tabel Laju Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah ADHK 2000 pada Thun 2000-2004 (%).....	69
19.	Tabel Nilai DLQ Sub Sektor Pertanian Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004	69
20.	Tabel Angka Pengganda Pendapatan dan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Perekonomian Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004.....	70
21.	Tabel Angka Pengganda Tenaga Kerja Kerja dan Kontribusi Tenaga Kerja sektor Pertanian terhadap Total Tenaga Kerja di Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004	70
22.	Tabel Gabungan LQ dan DLQ Sektor Perekonomian Kabupaten Kudus	71
23.	Tabel Gabungan LQ dan DLQ Sub Sektor Pertanian Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004.....	71



RINGKASAN

Linda Saraswati H0302062. 2008. Skripsi dengan Judul "**Identifikasi Dan Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Wilayah di Kabupaten Kudus**". Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor yang menjadi sektor basis di Kabupaten Kudus, mengetahui posisi sektor pertanian dan sub sektor pertanian di Kabupaten Kudus untuk masa yang akan datang, mengetahui perubahan posisi sektor pertanian dan sub sektor pertanian di Kabupaten Kudus dan mengetahui peranan sektor pertanian dalam perekonomian di Kabupaten Kudus dilihat dari angka pengganda pendapatan dan angka pengganda tenaga kerja yang diberikan.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Lokasi penelitian diambil secara sengaja (*purposive*), yaitu Kabupaten Kudus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS Kabupaten Kudus, BAPPEDA Kabupaten Kudus dan Dinas Pertanian Kabupaten Kudus.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *Location Quoiient (LQ)*, analisis *Dynamic Location Quotient (DLQ)*, analisis gabungan LQ dan DLQ serta efek pengganda pendapatan dan efek pengganda tenaga kerja.

Hasil penelitian yang didapat adalah : selama tahun 2000-2004 sektor pertanian merupakan sektor non basis di Kabupaten Kudus. Sub sektor tabama, tanaman perkebunan dan peternakan merupakan sub sektor basis, sedangkan sub sektor kehutanan dan perikanan merupakan sub sektor non basis. Dengan analisis *Dynamic Location Quotient (DLQ)* menunjukkan bahwa sektor pertanian mampu diharapkan untuk menjadi sektor basis di masa yang akan datang. Sub sektor tanaman perkebunan, peternakan dan perikanan mampu diharapkan untuk menjadi sub sektor basis di masa yang akan datang, sedangkan sub sektor tabama dan kehutanan tidak bisa diharapkan untuk menjadi sub sektor basis di masa yang akan datang. Berdasarkan analisis gabungan LQ dan DLQ, sektor pertanian mengalami perubahan posisi dari non basis menjadi basis. sub sektor tabama mengalami perubahan posisi dari basis menjadi non basis, sedangkan perikanan mengalami perubahan dari non basis menjadi basis. Kontribusi tertinggi sektor pertanian selama tahun 2000-2004 dilihat dari angka pengganda pendapatan sebesar 30,23 yaitu pada tahun 2003, sedangkan kontribusi sektor pertanian tertinggi jika dilihat dari angka pengganda tenaga kerja sebesar 6,19 yaitu pada tahun 2004.

SUMMARY

Linda Saraswati H0302062. **The Identification and Role of Agriculture Sector in Regional Development in Kudus Regency.** Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University, Surakarta.

This research was done in order to acknowledge the basic sector in Kudus Regency, acknowledge the changing position and future position of agriculture sector and sub sector in Kudus Regency, and also acknowledge the agriculture role in economic sector by the given income numeral and employees numeral.

The research use descriptive method, and used purposive location which is Kudus Regency. The data used are taken from BPS, BAPPEDA and Agricultural Department of Kudus Regency.

The analysis applied in this research are Location Quotient (LQ) analysis, Dynamic Location Quotient (DLQ) analysis, and combination of both analysis and also the income numeral and employees numeral effects.

The result are : agriculture sector is a non basis sector in Kudus Regency during 2000-2004. Tabama plantation product and farming are the basic sub sector, while forestry and fishery sector are non basic sub sector by DLQ analysis. Plantation, farm and fishery could be expected as future basic sub sector while tabama and forestry could not be expected as the next basic sub sector. Based on the combination of both analysis LQ and DLQ, agriculture sector's position changed from the non basic to basic sector. Tabama sub sector changed from basic to non basic sector, while non basic sector of fishery became the basic sector. The highest agriculture sector contribution during 2000-2004 based on income numeral is 30.23 in 2003, while the highest contribution, based on employees numeral is 6.19 in 2004.

**IDENTIFIKASI DAN PERANAN SEKTOR PERTANIAN DALAM
PEMBANGUNAN WILAYAH DI KABUPATEN KUDUS**

SKRIPSI



Oleh :

LINDA SARASWATI

H0302062

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2008

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah proses yang direncanakan dan merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan, berkelanjutan dan bertahap menuju ke tingkat yang lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan harus dilakukan secara bertahap di segala sektor maupun sub sektor secara terencana dan terprogram. Keseimbangan arah dan tujuan pembangunan menjadi suatu keharusan sebagai jaminan lancarnya proses pembangunan itu sendiri.

Pembangunan di Indonesia tidak lepas dari pembangunan masing-masing daerah di Indonesia karena pembangunan di daerah merupakan bagian integral dalam upaya mencapai sasaran nasional di daerah sesuai potensi, aspirasi dan prioritas masyarakat daerah. Sasaran pembangunan akan terwujud apabila pemerintah daerah mengetahui potensi daerah dan merumuskan strategi kebijakan dalam perencanaan pembangunan untuk pengembangan sektor perekonomian.

Sektor pertanian memegang peranan penting di Indonesia, termasuk pada beberapa daerah yang berada di wilayah negara Indonesia. Peranan itu dapat dilihat dari peranan sektor pertanian tempat penyedia lapangan kerja, penyedia pangan, penyumbang devisa negara melalui ekspor (Soekartawi, 1995).

Kabupaten Kudus mempunyai luas lahan sawah 21.692 Ha (51,02%) dan lahan bukan sawah yaitu seluas 20.824 Ha (48,98%). Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari tahun 2000 sampai tahun 2004 menduduki posisi ketiga, tetapi cenderung mengalami kenaikan yaitu dari proporsi 3,25 % pada tahun 2000 naik menjadi 3,60 % pada tahun 2004. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus dengan alasan walaupun luas lahan sawah mencapai 51,02% akan tetapi sektor pertanian menduduki peringkat ketiga dalam perekonomian daerah.

Menurut BAPPEDA (2004) pembangunan ekonomi di Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB pada tahun 2004 adalah sektor industri pengolahan yaitu sebesar 58,89 %; sektor perdagangan, hotel dan restoran 27,91 %; sektor pertanian 3,60 %; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 3,06 %; sektor jasa-jasa 2,60 %; sektor angkutan dan komunikasi 2,11 %; sektor bangunan 1,00 %; sektor listrik, gas dan air bersih 0,78 % serta sektor pertambangan dan penggalan 0,05 %.

Penduduk Kabupaten Kudus yang bekerja di sektor industri menduduki peringkat pertama yaitu sebanyak 149.613 jiwa atau 41,82%, sedangkan sisanya bekerja di sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel dan restoran serta di sektor perekonomian yang lain. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian menduduki peringkat kedua yaitu sebanyak 57835 jiwa atau 16,17% pada tahun 2004, sedangkan jumlah tenaga kerja yang menduduki peringkat ketiga adalah di sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebanyak 52675 jiwa atau 14,72%.

Kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Kudus tidak lepas dari sumberdaya yang dimiliki, yaitu potensi lahan, kekayaan alam serta peran masing-masing sub sektornya. Akan tetapi, apakah di tahun-tahun berikutnya sektor pertanian masih menduduki posisi ketiga dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian di Kabupaten Kudus. Oleh karena itu perlu dikaji identifikasi dan peranan sektor pertanian dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Kudus.

B. Perumusan Masalah

Kabupaten Kudus merupakan kabupaten yang terletak di bagian utara Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah sebesar 42.516 hektar. Kehidupan masyarakat Kabupaten Kudus pada umumnya bekerja di sektor industri.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Hal ini terlihat dari nilai PDRB yang terus meningkat selama tahun 2000-2004. Kondisi perekonomian Kabupaten Kudus

tercermin dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk lebih memperjelas nilai PDRB Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1. PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2000	2001	2002	2003	2004
Pertanian	99953.57	105161.89	111543.07	114899.71	125113.96
Pertambangan dan Pengalihan	1489.75	1560.73	1599.04	1693.84	1632.96
Industri Pengolahan	1834334.65	1880128.77	1938172.70	1995583.30	2046750.02
Listrik, Gas dan Air Bersih	19764.92	23703.28	25176.76	25955.13	27280.42
Bangunan	28711.87	29715.45	30749.48	33847.40	34808.92
Perdagangan, hotel dan restoran	873617.52	875852.66	902205.79	925040.44	970005.07
Angkutan dan Komunikasi	53852.35	55777.42	58466.98	63530.23	73342.08
Keuangan, Persewa dan Jasa Perusahaan	83522.16	89652.41	95758.81	99758.80	106461.39
Jasa-Jasa	81434.49	83756.47	85876.08	87946.44	90422.14
Jumlah	3076681.28	3145309.08	3249548.71	3348255.29	3475816.96

Sumber: BPS Kabupaten Kudus Tahun 2004

Sektor pertanian di Kabupaten Kudus merupakan penyumbang ketiga dalam pembentukan PDRB (BPS Kabupaten Kudus, 2003). Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2000 sebesar 3,25% dan meningkat pada tahun 2004 menjadi 3,6%. Padahal banyak lahan pertanian yang telah berubah menjadi lahan kering non pertanian baik untuk perumahan, industri maupun untuk kegiatan-kegiatan lain.

Dalam memberikan kontribusinya terhadap pembangunan di Kabupaten Kudus, sektor pertanian didukung oleh sub sektor tabama, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam sektor pertanian adalah sub sektor tabama yang selalu mengalami peningkatan dari tahun 2000-2004. Sedangkan sub sektor yang memberikan kontribusi terkecil dalam sektor pertanian adalah sub sektor kehutanan.

Sektor pertanian di Kabupaten Kudus belum mampu mencukupi kebutuhan perekonomian masyarakat. Pembangunan sektor pertanian perlu

terus ditingkatkan intensitasnya, dan diharapkan untuk tahun mendatang sektor pertanian mampu memberikan kontribusi yang lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya dalam perekonomian di Kabupaten Kudus.

Oleh karena itu dalam penelitian ini masalah yang dapat dirumuskan adalah :

1. Sektor apa yang menjadi basis ekonomi di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana posisi sektor pertanian dan sub sektor pertanian di Kabupaten Kudus di masa yang akan datang?
3. Bagaimana perubahan posisi sektor pertanian dan sub sektor pertanian di Kabupaten Kudus?
4. Bagaimana peranan sektor pertanian dalam perekonomian di Kabupaten Kudus dilihat dari angka pengganda pendapatan dan angka pengganda tenaga kerja yang diberikan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sektor yang menjadi sektor basis di Kabupaten Kudus.
2. Mengetahui posisi sektor pertanian dan sub sektor pertanian di Kabupaten Kudus untuk masa yang akan datang.
3. Mengetahui perubahan posisi sektor pertanian dan sub sektor pertanian di Kabupaten Kudus.
4. Mengetahui peranan sektor pertanian dalam perekonomian di Kabupaten Kudus dilihat dari angka pengganda pendapatan dan angka pengganda tenaga kerja yang diberikan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta pengalaman.
2. Bagi pembaca, sebagai bahan kajian dan wacana untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan.

II. LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian Setyowati (2004) mengenai Analisis Ekonomi Basis Sektor Pertanian di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, dimana analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan “Location Quotient” (LQ) dan “Dynamic Location Quotient” (DLQ), bertujuan untuk menentukan sektor perekonomian yang menjadi basis maupun non basis serta untuk menentukan sektor perekonomian yang masih dapat diandalkan pada masa yang akan datang. Sektor yang menjadi basis adalah sektor yang mempunyai nilai rata-rata $LQ \geq 1$ yaitu sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1,1; sektor industri pengolahan sebesar 1,77; sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,18; serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1,69. Sedangkan sektor yang masih dapat diandalkan di masa yang akan datang adalah sektor yang mempunyai nilai $DLQ \geq 1$ yaitu sektor pertanian sebesar 171,25; sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 5,74; sektor bangunan sebesar 5,08; sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,07; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 2,94; sektor angkutan dan komunikasi sebesar 193 serta sektor jasa-jasa sebesar 35,66.

Penelitian Dewi (2004) mengenai Analisis Sektor Pertanian Unggulan dalam Perekonomian Wilayah Kabupaten Klaten dengan Pendekatan Ekonomi Basis. Analisis yang digunakan adalah “Location Quotient” (LQ) dan “Dynamic Location Quotient” (DLQ) untuk menentukan sektor perekonomian yang menjadi basis maupun non basis serta untuk menentukan sektor perekonomian yang masih dapat diandalkan pada masa yang akan datang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sektor yang menjadi basis adalah sektor yang mempunyai nilai $LQ \geq 1$ yaitu sektor bangunan dan konstruksi sebesar 2,05; sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,14; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 1,33 serta sektor jasa-jasa sebesar 1,23. Sedangkan sektor perekonomian yang masih dapat diandalkan pada masa yang akan datang adalah sektor yang mempunyai nilai $DLQ \geq 1$ yaitu sektor

pertanian sebesar 1043938,02 serta sektor bangunan dan konstruksi sebesar 9117390,78.

Berdasarkan penelitian Puspowati (2004) yang berjudul Identifikasi Sektor Pertanian sebagai Sektor Unggulan di Kabupaten Kebumen, dimana analisis yang digunakan adalah Analisis Basis Ekonomi dengan pendekatan LQ dan DLQ. Sektor yang menjadi basis adalah sektor yang mempunyai nilai rata-rata $LQ \geq 1$ yaitu sektor pertanian sebesar 1,98; sektor pertambangan dan penggalan sebesar 3,57; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 1,17 serta sektor jasa-jasa sebesar 1,73. Sedangkan sektor yang masih dapat diandalkan di masa yang akan datang adalah sektor yang mempunyai nilai $DLQ \geq 1$ yaitu sektor penggalan sebesar 9,44224; sektor industri pengolahan sebesar 21992065,56019; sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 15,81531; sektor angkutan dan komunikasi sebesar 126,67137 serta sektor jasa-jasa sebesar 294,79238.

Berdasarkan penelitian Indriyani (2004) yang berjudul Peranan Sektor Padi dalam Pembangunan Wilayah di Kabupaten Kudus (dengan Pendekatan Analisis Input-Output), sektor industri makanan, minuman dan tembakau mempunyai jumlah output tertinggi dan merupakan kontributor terbesar terhadap total Nilai Tambah Bruto Kabupaten Kudus tahun 2002, sedangkan sektor pertanian belum mampu memberikan nilai tambah yang tinggi. Pada sektor pertanian, sektor yang mempunyai permintaan antara tertinggi adalah sektor padi, sedangkan sektor yang mempunyai permintaan antara terkecil adalah sektor kehutanan dan sektor perikanan.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian yang berjudul Identifikasi dan Peranan Sektor Pertanian dalam Pembangunan Wilayah di Kabupaten Kudus tidak berbeda jauh dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nuning Setyowati, Desy Kusuma Dewi, Cahyani Puspowati dan Cahyani Indriyani. Penelitian yang dilakukan oleh Nuning Setyowati dengan judul Analisis Ekonomi Basis Sektor Pertanian di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten menggunakan Analisis *Location Quotient (LQ)*, Analisis *Dynamic Location Quotient (DLQ)* serta Analisis Gabungan LQ dan

DLQ. Analisis yang digunakan Desy Kusuma Dewi dalam penelitian yang berjudul Analisis Sektor Pertanian Unggulan dalam Perekonomian Wilayah Kabupaten Klaten dengan Pendekatan Ekonomi Basis adalah Analisis *Location Quotient (LQ)*, Analisis *Dynamic Location Quotient (DLQ)*, Analisis Gabungan LQ dan DLQ serta Analisis Angka Pengganda Pendapatan dan Angka Pengganda Tenaga Kerja. Analisis yang digunakan oleh Cahyani Puspowati dalam penelitian yang berjudul Identifikasi Sektor Pertanian sebagai Sektor Unggulan di Kabupaten Kebumen adalah Analisis *Location Quotient (LQ)*, Analisis *Dynamic Location Quotient (DLQ)*, Analisis Surplus Pendapatan serta Analisis Spesialisasi Sektor (KS) dan Lokalisasi Sektor (Lo). Sedangkan analisis yang digunakan oleh Cahyani Indriyani dalam penelitian yang berjudul Peranan Sektor Padi dalam Pembangunan Wilayah di Kabupaten Kudus (dengan Pendekatan Analisis Input-Output) adalah Analisis Input-Output, Analisis Keterkaitan dan Analisis Deskriptif.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pembangunan

Pembangunan adalah proses perubahan yang dilakukan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bersangkutan, tetapi kadar dan prestasi pembangunan berbeda sesuai tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh masyarakat yang bersangkutan. Pembangunan juga dipengaruhi oleh kondisi fisik dan non fisik negara yang bersangkutan sehingga percepatan pembangunan yang ada di tiap negara tidak sama (Khairuddin,1992).

Pembangunan adalah usaha yang secara sadar dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Usaha ini akan dapat berlangsung terus menerus dalam jangka panjang dan akan berhasil jika terpenuhinya syarat-syarat pokoknya yaitu: subyek dan obyek pembangunan, sumber daya dan lingkungan hidup, proses pembangunan, iklim sosial politik, serta faktor sarana prasarana atau aparatur pembangunan (Suroto, 1992).

Pembangunan adalah suatu konsep yang lebih luas. Konsep ini mencakup pula modernisasi lembaga, baik yang bersifat ekonomi maupun bukan ekonomi, seperti pemerintah, kota, dan desa. Cara berpikir tidak saja berkenaan dengan tujuan agar dapat memproduksi secara efisien, melainkan juga agar mengkonsumsi secara rasional dan hidup lebih baik (Sicat, 1991).

2. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan kebijakan pemerintah untuk memperbaiki taraf hidup rakyat banyak. Kebijakan ini berpengaruh terhadap segala segi kehidupan rakyat, sosial, politik, keamanan dan ekonomi (Djojodipuro, 1994).

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Dumairy, 1997).

Pembangunan ekonomi bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakatnya (Arsyad, 1999).

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi mengandung tiga unsur yaitu :

1. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus menerus yang di dalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru.
2. Usaha meningkatkan pendapatan perkapita.
3. Kenaikan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Perkembangan ekonomi selalu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita karena kenaikan pendapatan perkapita merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat (Suryana, 2000).

Pembangunan ekonomi berurusan dengan perubahan struktural dan institusional yang cepat dan meliputi seluruh masyarakat, supaya hasil-hasil pembangunan bisa dilaksanakan dengan cara yang paling efisien untuk dibagikan kepada rakyat banyak. Ekonomi pembangunan menekankan peran pemerintah dalam membuat perencanaan ekonomi yang terkoordinir, yang didasarkan pada dukungan yang luas, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri (Budiman, 1996).

3. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999).

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti tingginya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, semakin terbukanya kesempatan kerja sehingga dapat menekan pengangguran, menurunnya jumlah penduduk yang hidup di bawah kemiskinan absolut, pergeseran struktur ekonomi ke arah yang lebih modern dan semakin besarnya kemampuan keuangan untuk membiayai administrasi pemerintah dan kegiatan pembangunan (Soekarni dan Mahmud, 2000).

4. Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang

ini ditentukan menjadi urusan pemerintah (pemerintah pusat). Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi: (a) politik luar negeri, (b) pertahanan, (c) keamanan, (d) yustisi, (e) moneter dan fiskal nasional, dan (f) agama. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan ini, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan atau pemerintahan desa.

Di dalam undang-undang ini juga dijelaskan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
- e. Penanganan bidang kesehatan
- f. Penyelenggaraan pendidikan
- g. Penanggulangan masalah sosial
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- j. Pengendalian lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertanahan
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Otonomi daerah menurut Basri (2002) adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Untuk mewujudkan keadaan tersebut maka berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkannya, kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara bangsa. Otonomi juga memberikan peluang bagi persaingan sehat antar daerah, tentu saja dengan jaring-jaring pengaman, bagi tercapainya persyaratan minimum bagi daerah-daerah yang dipandang masih belum mampu menyejajarkan diri dalam suatu *level of playing field*. Salah satu pilar yang harus ditegakkan dalam pengembangan otonomi daerah yang lebih nyata adalah aspek pembiayaan. Tanpa keseimbangan pemberian otonomi atara tugas dan tanggung jawab dengan aspek pendanaanya maka esensi dari otonomi menjadi kabur.

5. Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha (Arsyad, 1992).

Pembangunan pertanian dihadapkan pada kondisi lingkungan strategis yang terus berkembang secara dinamis dan menjurus pada liberalisasi perdagangan internasional dan investasi. Menghadapi perubahan lingkungan strategis tersebut serta untuk memanfaatkan peluang yang ditimbulkannya, maka pembangunan pertanian lebih

difokuskan pada komoditas-komoditas unggulan yang dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional. Kondisi ini menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah untuk mempercepat reorientasi arah pembangunan sektor pertanian (Daniel, 2002).

6. Peranan Sektor Pertanian dalam Perekonomian

Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam menyediakan input, yaitu tenaga kerja, bagi sektor industri dan sektor modern lain. Sebagian besar populasi pada sektor pertanian pedesaan merupakan sumber utama bagi kebutuhan tenaga kerja yang meningkat di sektor perkotaan. Pemasukan tenaga kerja di sektor perkotaan adalah mungkin, dan disamping itu biasanya ada kenaikan penduduk di sektor perkotaan itu sendiri, tetapi tidak ada satupun dari kedua sumber ini yang dapat mencukupi kebutuhan pertumbuhan ekonomi sepanjang waktu. Jika ada pembatasan keluarnya tenaga kerja dari pertanian, maka pembangunan ekonomi akan timpang (Arsyad, 1992).

Peranan utama pertanian adalah menyediakan tenaga kerja dan pangan yang cukup dengan harga murah untuk perkembangan industri yang dinamis sebagai sektor penting dalam semua strategi pembangunan. Tanpa pembangunan pertanian dan pedesaan, pertumbuhan industri mungkin akan mencapai kegagalan dan walaupun berhasil akan menciptakan ketimpangan perekonomian intern, dimana meluasnya kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran akan semakin parah (Todaro, 2000).

Sektor pertanian di Indonesia memiliki kemampuan dalam mengisi pembangunan yang dipercayai dapat menjamin pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor pertanian dapat memenuhi beberapa syarat utama sebagai sektor andalan, yaitu tangguh, progresif dan ukurannya cukup luas dan responsif. Ketangguhan sektor pertanian diindikasikan oleh kemampuan dalam memberi kontribusi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja pada masa krisis ekonomi yang sedang

berlangsung. Sektor pertanian berpotensi progresif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional jika didukung kebijaksanaan yang tepat (Daniel, 2001).

7. Teori Ekonomi Basis

Inti dari model ekonomi basis (*economic base model*) adalah bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut. Ekspor tersebut berupa barang-barang dan jasa, termasuk tenaga kerja. Akan tetapi dapat juga berupa pengeluaran orang asing yang berada di wilayah tersebut terhadap barang-barang tidak bergerak (*immobile*), seperti yang berhubungan dengan aspek geografi, iklim, peninggalan sejarah atau daerah pariwisata (contoh daerah wisata Ujung Kulon, daerah Puncak) dan sebagainya. Sektor (industri) yang bersifat seperti ini disebut sektor basis (Budiharsono, 2001).

Teori ekonomi basis mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya ekspor dari wilayah tersebut. Demikian juga dengan usaha-usaha lokal tetapi memiliki langganan dari luar wilayah dapat dikategorikan sebagai kegiatan basis (Tarigan, 2002).

Untuk mengetahui apakah suatu sektor merupakan sektor basis atau non basis dapat digunakan beberapa metode, yaitu metode pengukuran langsung dan metode pengukuran tidak langsung. Metode pengukuran langsung dapat dilakukan dengan survey langsung untuk mengidentifikasi sektor mana yang merupakan sektor basis. Metode ini dapat menentukan sektor basis dengan tepat. Akan tetapi metode ini memerlukan biaya, waktu dan tenaga kerja yang banyak. Mengingat hal tersebut diatas, maka sebagian besar pakar ekonomi wilayah menggunakan model pengukuran tidak langsung. beberapa metode pengukuran tidak langsung, yaitu: (1) metode melalui pendekatan asumsi; (2) metode *Location Quotient*; (3) metode kombinasi (1) dan (2); dan (4) metode kebutuhan minimum. Metode pendekatan melalui asumsi, yaitu bahwa semua sektor industri

primer dan manufaktur adalah sektor basis, sedangkan sektor jasa adalah sektor non basis. Metode Location Quotient (LQ) merupakan perbandingan antara pangsa relatif pendapatan tenaga kerja sektor i pada tingkat wilayah terhadap pendapatan tenaga kerja total wilayah dengan pangsa relatif pendapatan tenaga kerja sektor i pada tingkat nasional terhadap pendapatan tenaga kerja nasional. Kelemahan metode LQ adalah kegagalannya untuk menghitung ketidakseragaman permintaan dan produktivitas nasional secara menyeluruh. Metode kombinasi antara pendekatan asumsi dengan metode LQ dikemukakan oleh Hoyt. Ia menyarankan adanya beberapa aturan untuk membedakan sektor basis dengan sektor non basis, yaitu:

1. Semua tenaga kerja dan pendapatan dari sektor (industri) ekstraktif (extractive industries) adalah sektor basis.
2. Semua tenaga kerja dan pendapatan dari sumber “khusus” seperti politik, pendidikan, kelembagaan, tempat peristirahatan, kegiatan hiburan dipertimbangkan sebagai sektor basis.

Metode kebutuhan minimum melibatkan penyeleksian sejumlah wilayah yang “sama” dengan wilayah yang diteliti, dengan menggunakan distribusi minimum dari tenaga kerja regional dan bukannya distribusi rata-rata (Budiharsono, 2001).

Kelemahan LQ adalah bahwa kriteria sektor basis bersifat statis yang hanya memberikan gambaran pada satu titik waktu. Artinya bahwa sektor basis tahun ini belum tentu akan menjadi sektor basis di waktu yang akan datang, sebaliknya sektor yang belum basis pada saat ini mungkin akan menjadi sektor basis di masa yang akan datang. Untuk mengatasi kelemahan LQ sehingga dapat diketahui reposisi/perubahan sektoral digunakan varians dari LQ yang disebut DLQ, yaitu dengan memperkenalkan laju pertumbuhan dengan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral ataupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan/tahun sendiri selama kurun waktu tahun awal dan tahun berjarak (Suyatno, 2002).

Metode Location Quotient (LQ) digunakan untuk membandingkan kemampuan sektor-sektor perekonomian di suatu wilayah dengan kemampuan sektor perekonomian di wilayah yang lebih luas. LQ dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : (Riyadi dan Brathakusuma, 2005).

$$LQ = \frac{Si/S}{Ni/N}$$

Keterangan :

Si : Pendapatan/ Jumlah tenaga kerja sektor i di suatu wilayah

S : Pendapatan/ Jumlah tenaga kerja total di suatu wilayah

Ni : Pendapatan/ Jumlah tenaga kerja sektor i secara nasional

N : Pendapatan/ Jumlah tenaga kerja total secara nasional

Istilah wilayah nasional dapat diartikan untuk wilayah induk/wilayah atasan. Apabila diperbandingkan antara wilayah kabupaten dengan wilayah provinsi, maka provinsi memegang peranan sebagai wilayah nasional dan seterusnya.

Dari rumus tersebut dapat diketahui kriteria nilai LQ, sebagai berikut :

$LQ > 1$, artinya produk sektor i mampu memenuhi kebutuhan daerah yang bersangkutan serta mampu mengekspor ke luar daerah.

$LQ < 1$, artinya produk sektor i belum mampu memenuhi kebutuhan daerah yang bersangkutan dan masih mengimpor dari daerah lain.

$LQ = 1$, artinya terjadi keseimbangan antara kebutuhan dengan produk yang dihasilkan oleh sektor terkait.

C. Kerangka Teori Pendekatan Masalah

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Anonim, 2004).

Adanya otonomi daerah menunjukkan bahwa suatu daerah tidak lagi tergantung pada pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan bagi daerahnya. Dengan berpegang pada potensi dan sumberdaya yang dimiliki maka suatu daerah harus dapat menentukan sektor-sektor yang dapat menjadi prioritas dalam melaksanakan pembangunan yaitu dengan mengembangkan sektor-sektor basis baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Pengembangan sektor basis diharapkan dapat mendukung tercapainya sasaran pembangunan sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Sektor pertanian masih dipandang sebagai sektor yang mampu menyediakan pangan bagi masyarakat, penyerap tenaga kerja serta pemasok bahan baku bagi kegiatan industri yang dirasa perlu mendapat prioritas. Pengembangan komoditas pertanian sebagai penopang sektor pertanian perlu mendapat perhatian sehingga memperkuat basis pertanian di suatu daerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode "*Location Quotient*" (*LQ*). Metode *LQ* merupakan perbandingan antara besarnya peranan suatu sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut secara nasional. Metode *LQ* digunakan untuk menentukan sektor pertanian dan sub sektor pertanian merupakan basis maupun non basis.

Dengan kriteria $LQ > 1$, maka sektor tersebut merupakan sektor basis, artinya produk sektor *i* mampu memenuhi kebutuhan daerah yang bersangkutan serta mampu mengekspor ke luar daerah. Sedangkan untuk $LQ \leq 1$, maka sektor tersebut merupakan sektor non basis, artinya produk sektor *i* hanya mampu mencukupi kebutuhan daerah sendiri dan belum mampu untuk mengekspor ke luar daerah.

Sedangkan untuk mengetahui posisi kegiatan basis dan kegiatan non basis dalam kedudukannya di masa yang akan datang digunakan *Dynamic Location Quotient* (*DLQ*). Dengan kriteria $DLQ > 1$, maka sektor tersebut masih dapat diharapkan untuk basis dimasa yang akan datang. Sedangkan untuk $DLQ \leq 1$, maka sektor tersebut tidak dapat diharapkan untuk basis di masa yang akan datang.

Untuk mengetahui peranan sektor pertanian di Kabupaten Kudus, digunakan perhitungan angka pengganda pendapatan dan angka pengganda tenaga kerja.

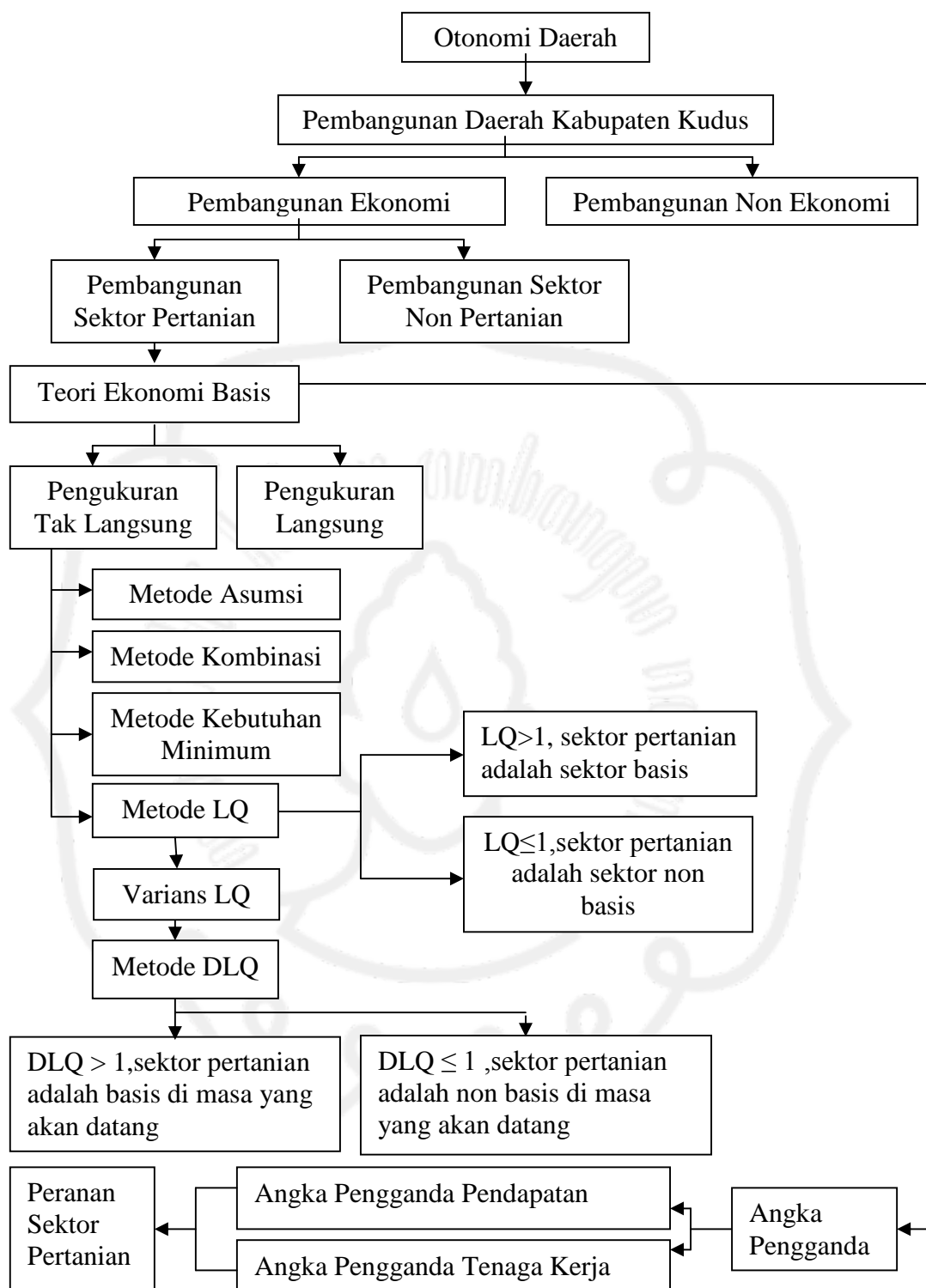
Secara skematis kerangka teori pendekatan masalah ini dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2 :

D. Asumsi-Asumsi

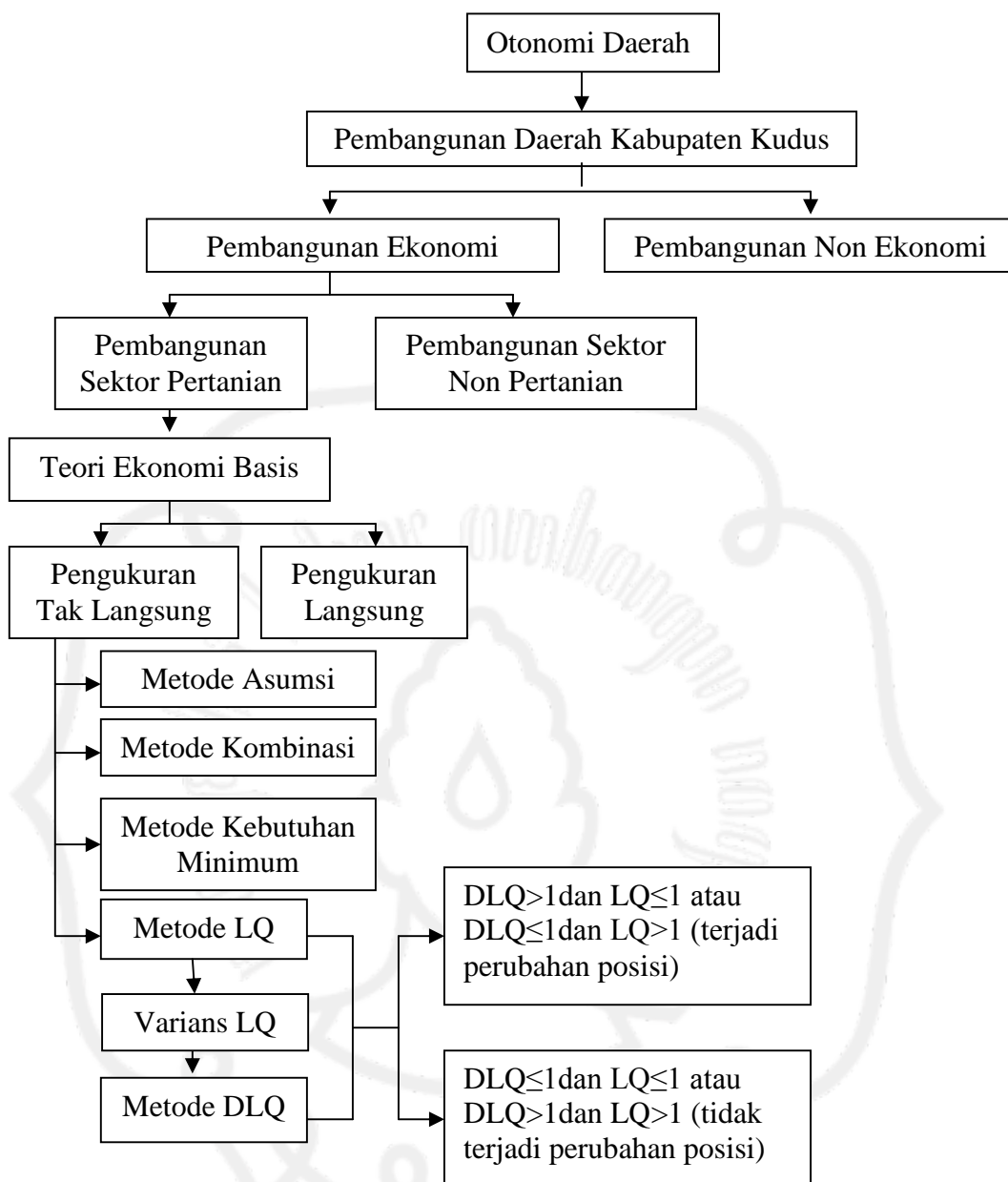
1. Kebutuhan barang tiap sektor perekonomian di Kabupaten Kudus akan dipenuhi terlebih dahulu oleh produksi sendiri dan kekurangannya akan dibeli dari kabupaten lain.
2. Adanya pola permintaan yang sama antara penduduk di Kabupaten Kudus dengan penduduk Provinsi Jawa Tengah.

E. Pembatasan Masalah

Penelitian memusatkan pada analisis ekonomi basis dengan menggunakan data time series berupa data PDRB Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2000-2004 Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000.



Gambar 1. Skema Alur Penelitian Dalam Identifikasi dan Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Wilayah di Kabupaten Kudus



Gambar 2. Kerangka Teori Pendekatan Masalah untuk Menentukan Perubahan Posisi Sektor Pertanian di Kabupaten Kudus

F. Definisi Operasional dan Konsep Pengukuran Variabel

1. Identifikasi adalah penentuan atau penetapan identitas. Dalam penelitian ini adalah penentuan dan atau penetapan identitas sektor pertanian yang diukur berdasarkan nilai LQ dan DLQ.
2. Peranan adalah fungsi suatu kegiatan ekonomi atau sektor terhadap perekonomian wilayah atau daerah. Dalam penelitian ini, sektor pertanian

yang diukur berdasarkan analisis angka pengganda pendapatan dan angka pengganda tenaga kerja dari sektor pertanian yang dihasilkan.

3. Sektor adalah lapangan usaha mencakup beberapa unit produksi yang terdapat dalam suatu perekonomian.
4. Sektor pertanian adalah sektor yang dalam proses produksinya berhubungan proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan hewan.

Sektor pertanian mencakup beberapa sub sektor, yaitu :

- a. Sub sektor tanaman bahan makanan
 - b. Sub sektor tanaman perkebunan
 - c. Sub sektor peternakan
 - d. Sub sektor kehutanan
 - e. Sub sektor perikanan
5. Sektor basis adalah sektor yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk pasar lokal maupun pasar diluar daerah itu dengan kriteria nilai $LQ > 1$.
 6. Sektor non basis adalah sektor yang hanya menghasilkan barang dan jasa untuk pasar lokal. Sektor non basis dapat disimpulkan apabila nilai $LQ \leq 1$.
 7. PDRB adalah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa dari seluruh sektor ekonomi dalam perekonomian suatu daerah dan pada waktu tertentu.
 8. Laju pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan membandingkan nilai PDRB suatu sektor pada tahun tertentu dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya.
 9. Metode *Location Quotient (LQ)* merupakan perbandingan antara pangsa relatif pendapatan/tenaga kerja sektor i pada tingkat wilayah terhadap pendapatan/tenaga kerja total wilayah dengan pangsa relatif pendapatan/tenaga kerja sektor i pada tingkat nasional terhadap pendapatan/tenaga kerja nasional. Metode LQ digunakan untuk menentukan suatu sektor merupakan basis atau non basis.

10. Metode *Dynamic Location Quotient (DLQ)* digunakan untuk mengetahui posisi kegiatan basis dan kegiatan non basis dalam kedudukannya di masa yang akan datang.
11. Posisi sektor adalah kedudukan suatu sektor dalam perekonomian wilayah. Dalam hal ini posisi sektor dilihat dari kategori suatu sektor tersebut sebagai sektor basis atau sektor non basis.
12. Perubahan posisi sektoral adalah perubahan posisi suatu sektor dimasa yang akan datang terhadap posisi sektor pada masa sekarang. Dalam penelitian ini perubahan posisi sektor dilihat dari perubahan sektor basis atau sektor non basis. Untuk menentukan perubahan posisi sektoral digunakan metode LQ dan DLQ yang memiliki nilai $LQ \leq 1$ dan $DLQ \leq 1$ atau $LQ > 1$ dan $DLQ > 1$ yang berarti tetap non basis atau basis serta nilai $LQ \leq 1$ dan $DLQ > 1$ atau $LQ > 1$ dan $DLQ \leq 1$ yang berarti berubah menjadi basis ataupun non basis.
13. Angka pengganda pendapatan adalah perkiraan mengenai potensi kenaikan pendapatan dari suatu kegiatan ekonomi baru di dalam masyarakat.
14. Angka Pengganda Tenaga Kerja adalah metode untuk mengukur pengaruh suatu kegiatan ekonomi baru terhadap penciptaan jumlah tenaga kerja.

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Dasar Penelitian

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual. Data yang telah dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis (Surakhmad, 1994).

B. Metode Pengambilan Daerah Penelitian

Daerah penelitian diambil secara sengaja (*purposive*), yaitu cara pengambilan lokasi dengan mempertimbangkan alasan yang diketahui dari sifat daerah/lokasi tersebut sesuai tujuan penelitian (Singarimbun, 1995).

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus dengan pertimbangan bahwa : luas lahan sawah di Kabupaten Kudus adalah 21.692 Ha atau 51,02% dari total lahan di Kabupaten Kudus yang merupakan lahan sawah dan lahan non sawah atau lahan kering, dan menduduki peringkat ketiga dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Kudus pada tahun 2000-2004.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang diluar peneliti, walau data yang dikumpulkan adalah data asli (Surakhmad, 1990).

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus, BAPPEDA Kabupaten Kudus dan Dinas Pertanian Kabupaten Kudus. Data yang digunakan adalah PDRB Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 tahun 2000-2004, PDRB Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2000-2004, Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan

Tahun 1993 tahun 2000-2004, serta Indeks Harga Implisit Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2000-2004.

D. Metode Analisis Data

1. Penentuan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

Dalam penelitian ini digunakan data PDRB ADHK tahun 2000. Data PDRB yang diperoleh adalah data PDRB ADHK tahun 1993 yang terlebih dahulu diubah ke dalam ADHK tahun 2000 dengan metode menurut Sukirno (1995) sebagai berikut :

$$PN_{riil_i} = \frac{IH_D}{IH_t} \times PN_{\text{masa kini}_i}$$

Dimana :

PN_{riil_i} : PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 tahun i

HI_D : Indeks harga implisit tahun dasar

HI_t : Indeks harga implisit tahun i

$PN_{\text{masa kini}_i}$: PDRB ADHB tahun i

Tahun i : Tahun penelitian

2. Identifikasi Sektor Pertanian dan Sub Sektor Pertanian

Analisis *Location Quotient (LQ)* digunakan untuk mengidentifikasi sektor pertanian maupun sub sektor pertanian di Kabupaten Kudus. Besarnya nilai *Location Quotient (LQ)* dapat diperoleh dari persamaan sebagai berikut :

$$LQ = \frac{vi/vt}{Vi/Vt}$$

Dimana :

LQ : Nilai *Location Quotient*

vi : PDRB sektor/sub sektor pertanian wilayah Kabupaten Kudus

vt : PDRB total wilayah Kabupaten Kudus

Vi : PDRB sektor/sub sektor pertanian wilayah Provinsi Jawa

Tengah

Vt : PDRB total wilayah Provinsi Jawa Tengah

Kriteria :

Apabila $LQ > 1$ berarti sektor maupun sub sektor pertanian merupakan sektor basis. Sedangkan $LQ \leq 1$ berarti sektor maupun sub sektor pertanian merupakan sektor non basis.

3. Analisis Posisi Sektor Pertanian dan Sub Sektor Pertanian di Masa yang Akan Datang

Untuk mengatasi kelemahan metode *Location Quotient (LQ)* digunakan varians dari metode *Location Quotient (LQ)* yaitu *Dynamic Location Quotient (DLQ)*. Metode *Dynamic Location Quotient (DLQ)* menggambarkan posisi sektor maupun sub sektor pertanian di masa mendatang.

$$DLQ : \left[\frac{(1 + g_{ij}) / (1 + g_j)}{(1 + G_i) / (1 + G)} \right]^t$$

Dimana :

DLQ : Indeks *Dynamic Location Quotient*

g_{ij} : Rata-rata laju pertumbuhan sektor/sub sektor pertanian Kabupaten Kudus

g_j : Rata-rata laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus

G_i : Rata-rata laju pertumbuhan sektor/sub sektor pertanian Provinsi Jawa Tengah

G_j : Rata-rata laju pertumbuhan PDRB seluruh sektor Provinsi Jawa Tengah

t : Jumlah tahun analisis

Jika $DLQ > 1$, sektor maupun sub sektor pertanian masih dapat diharapkan untuk basis di masa yang akan datang. Jika $DLQ \leq 1$, sektor maupun sub sektor pertanian tidak dapat diharapkan untuk basis di masa yang akan datang. (Suyatno, 2002).

4. Analisis Identifikasi Sektor Pertanian dan Sub Sektor Pertanian Untuk Masa Sekarang dan Masa Depan

Analisis gabungan LQ dan DLQ digunakan untuk mengetahui perubahan posisi dan potensi baik sektor maupun sub sektor untuk masa yang akan datang dengan rincian sebagai berikut :

1. $LQ > 1$ dan $DLQ > 1$, berarti sektor pertanian tetap menjadi basis
2. $LQ > 1$ dan $DLQ \leq 1$, berarti sektor pertanian mengalami perubahan posisi dari basis menjadi non basis sehingga tidak dapat diharapkan menjadi basis di tahun-tahun yang akan datang
3. $LQ \leq 1$ dan $DLQ > 1$, berarti sektor pertanian telah mengalami perubahan posisi dari non basis menjadi sektor basis sehingga dapat diharapkan basis di tahun-tahun mendatang
4. $LQ \leq 1$ dan $DLQ \leq 1$, berarti sektor pertanian tetap non basis

5. Peranan Sektor Pertanian

a. Angka Pengganda Pendapatan

$$MS = \frac{Y}{YP} \quad \Delta Y_{SR} = MS \times \Delta YP$$

Keterangan :

- Y : Pendapatan total wilayah Kabupaten Kudus
 ΔY : Perubahan pendapatan total wilayah Kabupaten Kudus
 YP : Pendapatan sektor pertanian di Kabupaten Kudus
 ΔYP : Perubahan pendapatan sektor pertanian di Kabupaten Kudus
 MS : Pengganda pendapatan sektor pertanian

b. Angka Pengganda Tenaga Kerja

$$K = \frac{N}{NP} \quad \Delta N = \Delta NP \times K$$

Keterangan :

- N : Jumlah tenaga kerja total di Kabupaten Kudus
- ▲N : Perubahan tenaga kerja total di Kabupaten Kudus
- NP : Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian di Kabupaten Kudus
- ▲NP : Perubahan tenaga kerja sektor pertanian di Kabupaten Kudus
- K : Pengganda tenaga kerja



IV. KEADAAN UMUM KABUPATEN KUDUS

A. Keadaan Umum

1. Letak Geografis dan Wilayah Administratif

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 42.516 ha. Secara astronomis Kabupaten Kudus terletak antara $110^{\circ}36'$ dan $110^{\circ}50'$ BT dan $6^{\circ}51'$ dan $7^{\circ}16'$ LS, dengan jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km.

Secara administratif Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 kecamatan, 125 desa serta 7 kelurahan. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Dawe yaitu 8.584 ha, sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kota seluas 1.047 ha. Luas wilayah Kabupaten Kudus adalah 42.516 ha atau sekitar 1,31% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Dari luas tersebut, 21.692 ha (51,02%) merupakan lahan sawah dan 20.824 ha (48,98%) adalah bukan lahan sawah. Walaupun 50 % lebih lahannya berupa sawah, justru sektor industri yang hingga saat ini memberikan kontribusi besar bagi pembangunan wilayah sehingga Kabupaten Kudus dikenal sebagai kota industri.

Batas-batas wilayah Kabupaten Kudus adalah :

Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati
Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati
Sebelah Timur : Kabupaten Pati
Sebelah Barat : Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara

2. Topografi

Kabupaten Kudus merupakan wilayah dengan topografi berupa dataran rendah dan pegunungan. Daerah dengan topografi pegunungan berada di Kecamatan Dawe. Daerah ini terletak di lereng Gunung Muria.

Sedangkan untuk daerah dataran rendah berada di kecamatan lainnya. Kabupaten Kudus merupakan daerah yang berketinggian rata-rata ± 55 m di atas permukaan air.

3. Jenis Tanah dan Pemanfaatan Lahan

Dengan luas wilayah 42.516 ha, pemanfaatan lahan di Kabupaten Kudus terdiri dari 2 jenis, yaitu 21.692 ha (51,02%) merupakan lahan sawah dan 20,824 ha (48,98%) merupakan lahan bukan sawah. Menurut penggunaannya, lahan di Kabupaten Kudus terdiri dari lahan sawah dengan pengairan teknis seluas 4.201 ha (19,37%) dan sisanya berpengairan $\frac{1}{2}$ teknis, sederhana, tadah hujan dan lainnya. Sedangkan lahan bukan sawah yang digunakan untuk bangunan dan halaman sekitar adalah seluas 9,995 ha (23,51%) dari luas Kabupaten Kudus. Luas lahan di Kabupaten Kudus menurut pemanfaatannya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas Lahan Menurut Pemanfaatannya di Kabupaten Kudus Tahun 2004

Macam Pemanfaatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Lahan Sawah	21.692	51,02
1. Irigasi teknis	4.201	9,90
2. Irigasi $\frac{1}{2}$ teknis	5.752	13,53
3. Irigasi sederhana	3.425	8,06
4. Tadah hujan	7.696	18,10
5. Lainnya	618	1,43
Bukan Lahan Sawah/Lahan kering	20.824	48,98
6. Tanah bangunan dan halaman sekitar	9.995	23,51
7. Tegal/kebun	6.100	14,35
8. Tanah sementara tidak diusahakan	168	0,40
9. Hutan rakyat	139	0,33
10. Hutan Negara	1.882	4,43
11. Perkebunan	112	0,26
12. Lainnya	2428	5,70
Total	42.516	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2004

Dari Tabel 2. terlihat bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Kudus merupakan lahan sawah, walaupun begitu bukan berarti sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Justru sektor industri yang

banyak menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakatnya karena seperti diketahui bersama, Kudus merupakan kota industri.

4. Keadaan Iklim

Kabupaten Kudus merupakan daerah yang beriklim tropis dan bertemperatur sedang dengan curah hujan relatif rendah, rata-rata dibawah 2000 mm/hari dan berhari hujan rata-rata 97 hari/tahun. Suhu udara rata-rata di Kabupaten Kudus berkisar antara 20,2⁰C – 27,9⁰C. jumlah hari hujan terbanyak pada bulan Pebruari yaitu 18 hari dan curah hujan tertinggi pada bulan Desember yaitu 292 mm.

B. Keadaan Penduduk

1. Jumlah dan Komposisi Penduduk

Dari tahun ke tahun jumlah penduduk di Kabupaten Kudus selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2004, penduduk di kabupaten Kudus berjumlah 730.754 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 5.785 jiwa dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah penduduk ini disebabkan oleh besarnya angka kelahiran dibandingkan dengan angka kematiannya. Untuk lebih jelasnya data mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 3. :

Tabel 3. Jumlah dan Komposisi Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2004 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Angka Ketergantungan (%)
0 – 14	105.139	99.131	204.270	48,26
15 – 64	241.167	251.706	492.873	
65 +	14.976	18.635	33.611	
Total	361.282	369.472	730.754	48,26

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2004

Berdasarkan usia, penduduk digolongkan menjadi dua yaitu penduduk usia produktif dan usia non produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15 – 64 tahun, sedangkan penduduk usia non produktif adalah yang berusia 0 – 14 tahun dan usia 65 tahun ke atas.

Dari Tabel 3. dapat diketahui bahwa persentase angka ketergantungan pada tahun 2004 sebesar 48,26. Artinya setiap seratus penduduk usia produktif harus menanggung 48 penduduk usia non produktif.

Tingkat pendidikan satu daerah dengan daerah lain berbeda sesuai dengan keadaan sosial ekonomi keluarga maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Berikut adalah komposisi penduduk Kabupaten Kudus berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2004 :

Tabel 4. Penduduk Usia 10 tahun Ke Atas Kabupaten Kudus Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2004

Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
Tidak / Belum Pernah Sekolah	47.538	7,98
Tidak / Belum Tamat SD/MI	99.129	16,65
Tamat SD/MI	228.565	38,38
Tamat SLTP	116.963	19,64
Tamat SLTA	88.245	14,82
Tamat Akademi/ Diploma/ Sarjana	15.042	2,53
Jumlah	595.482	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2004

Dari Tabel 4. dapat diketahui bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh maka semakin sedikit jumlah penduduk yang menempuhnya. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Kudus adalah tamat SD/MI dan tamat SLTP, yaitu sebanyak 38,38% tamat SD/MI dan 19,64% tamat SLTP. Sedangkan penduduk yang mampu menempuh jenjang pendidikan sampai tingkat Akademi/ Diploma/ Sarjana sebanyak 2,53%. Hal ini membuktikan masih rendahnya jumlah penduduk yang melaksanakan program pendidikan dasar 9 tahun yaitu pendidikan sampai tamat SLTP.

Tabel 5. Penduduk Kabupaten Kudus Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2000-2004

Tahun	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Sex Ratio
2000	348.938	358.391	707.329	97,36
2001	352.491	361.953	714.444	97,39
2002	354.899	364.294	719.193	97,42
2003	358.255	366.714	724.969	97,69
2004	361.282	369.472	730.754	97,78
Rata-rata				97,53

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2004

Dari Tabel 5. dapat diketahui bahwa pada tahun 2000 – 2004 jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki serta memiliki sex ratio yang tidak jauh berbeda yaitu 97,36 – 97,78 atau hampir mendekati 98. Hal ini berarti dalam seratus penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Sex ratio menunjukkan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dalam 100 penduduk perempuan.

2. Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja merupakan penduduk yang berusia 10 tahun ke atas dan dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk usia kerja di Kabupaten Kudus pada tahun 2004 adalah sebesar 357.752 jiwa. Dari jumlah tersebut, sektor yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor industri. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 6. :

Tabel 6. Penduduk (10 tahun ke atas) yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Kudus Tahun 2004

Lapangan Usaha Utama	Jumlah	Persentase
1. Pertanian	57.835	16,17
2. Pertambangan dan Penggalian	1.097	0,31
3. Industri	149.613	41,83
4. Listrik, Gas dan Air	1.466	0,41
5. Bangunan	34.190	9,56
6. Perdagangan, Hotel dan restoran	52.675	14,73
7. Transportasi/Komunikasi	17.041	4,76
8. Keuangan	4.207	1,18
9. Jasa-Jasa	39.628	11,05
Jumlah	357.628	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2004

Dari Tabel 6. jelas bahwa sektor industri masih menjadi tumpuan hidup penduduk di Kabupaten Kudus, terbukti 41,83% penduduk bermata pencaharian di sektor tersebut. Sektor lain yang menjadi tumpuan hidup masyarakat adalah sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 14,73%. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 16,17%. Sedangkan yang lain bekerja di sektor pertambangan dan penggalian; listrik, gas dan air; bangunan; transportasi/komunikasi; keuangan dan sektor jasa-jasa.

C. Keadaan Perekonomian

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus ditunjukkan dengan besarnya laju pertumbuhan PDRB. Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus ADHK 1993, pada tahun 2000 laju pertumbuhan mencapai 1,89% dan mengalami kenaikan menjadi 3,81% pada tahun 2004. Data lengkap laju pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan 2000 dapat dilihat dalam Tabel 7. :

Tabel 7. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perekonomian Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004 Atas Dasar Harga Konstant 1993 (%)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2000	2001	2002	2003	2004
Pertanian	2,36	5,21	6,07	3,01	8,89
Pertambangan dan Penggalian	0,52	4,76	2,45	5,93	-3,59
Industri Pengolahan	0,76	2,50	3,09	2,96	2,56
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,52	19,93	6,22	3,09	5,11
Bangunan	2,17	3,50	3,48	10,07	2,84
Perdagangan, hotel dan restoran	4,83	0,26	3,01	2,53	4,86
Angkutan dan Komunikasi	4,05	3,57	4,82	8,66	15,44
Keuangan, Persewa dan Jasa Perusahaan	-3,41	7,34	6,81	4,18	6,77
Jasa-Jasa	1,00	2,85	2,53	2,41	2,82
PDRB	1,89	2,23	3,31	3,04	3,81

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 12

2. Struktur Perekonomian

Sektor pertanian mempunyai peranan yang penting dalam PDRB Kabupaten Kudus. Selama tahun 2000-2004, distribusi sektor pertanian selalu mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2000 sebesar 3,25% menjadi 3,60% pada tahun 2004. Selama tahun 2000-2004 sektor perekonomian yang mengalami peningkatan distribusi PDRB adalah sektor pertanian; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan; sektor angkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sektor perekonomian yang mengalami penurunan distribusi PDRB adalah sektor industri pengolahan; sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian mempunyai nilai distribusi PDRB tetap yaitu 0,05.

Tabel 8. Distribusi PDRB Kabupaten Kudus ADHK 1993 Tahun 2000-2004. (%)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2000	2001	2002	2003	2004
Pertanian	3,25	3,34	3,43	3,43	3,60
Pertambangan dan Penggalian	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Industri Pengolahan	59,62	59,78	59,64	59,60	58,89
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,64	0,75	0,77	0,78	0,78
Bangunan	0,93	0,94	0,95	1,01	1,00
Perdagangan, hotel dan restoran	28,39	27,85	27,76	27,63	27,91
Angkutan dan Komunikasi	1,75	1,77	1,80	1,90	2,11
Keuangan, Persewa dan Jasa Perusahaan	2,71	2,85	2,95	2,98	3,06
Jasa-Jasa	2,65	2,66	2,64	2,63	2,60

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 12

3. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Pendapatan perkapita merupakan nilai rata-rata pendapatan penduduk.

Tabel 9. Pendapatan Perkapita Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004

Tahun	PDRB Perkapita ADHK 1993
2000	4.372.018,56
2001	4.424.311,03
2002	4.534.270,90
2003	4.636.547,97
2004	4.777.715,88

Sumber : Kudus dalam Angka Tahun 2004

Dari Tabel 9. terlihat bahwa pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Kudus pada tahun 2000 sampai tahun 2004 selalu mengalami kenaikan. Pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Kudus pada tahun 2000 sebesar Rp. 4.372.018,56 dan pada tahun 2001 sebesar Rp. 4.424.311,03. Pada tahun 2002 pendapatan perkapita Kabupaten Kudus sebesar Rp. 4.534.270,90 sedangkan pada tahun 2003 sebesar Rp. 4.636.547,97 dan pada tahun 2004 sebesar Rp. 4.777.715,88.

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Identifikasi Sektor Pertanian dan Sub Sektor Pertanian

Teori ekonomi basis dibagi menjadi dua bagian, yaitu sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis adalah sektor perekonomian yang mampu mencukupi kebutuhan wilayahnya sendiri dan mampu mengekspor produknya ke luar wilayah. Sedangkan sektor non basis adalah sektor perekonomian yang hanya mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri dan belum bisa mengekspor produknya keluar wilayah.

Teori ekonomi basis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Location Quotien (LQ)* dan metode *Dynamic Location Quotient (DLQ)*. Metode *Location Quotient (LQ)* digunakan untuk mengetahui posisi sektor perekonomian di suatu wilayah, yaitu dengan mengetahui sektor basis dan sektor non basis suatu sektor perekonomian. Metode DLQ merupakan varian dari metode LQ yang digunakan untuk mengetahui perubahan posisi sektor perekonomian di masa yang akan datang, apakah suatu sektor perekonomian mengalami atau tidak mengalami perubahan posisi baik dari sektor basis menjadi sektor non basis ataupun sebaliknya, atau tetap menjadi sektor basis dan sektor non basis.

1. Sektor Perekonomian

Analisis *Location Quotient (LQ)* digunakan untuk mengetahui basis tidaknya suatu sektor perekonomian. Nilai $LQ > 1$ dinyatakan sebagai sektor basis, sedangkan nilai $LQ \leq 1$ dinyatakan sebagai sektor non basis. Nilai LQ sektor perekonomian Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 10 :

Tabel 10. Nilai *Location Quotient (LQ)* Sektor Perekonomian di Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-Rata	Keterangan
	2000	2001	2002	2003	2004		
Pertanian	0,19	0,17	0,17	0,16	0,16	0,17	Non Basis
Pertambangan dan penggalian	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	Non Basis
Industri Pengolahan	1,90	1,88	1,83	1,84	1,82	1,86	Basis
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,70	0,93	1,43	2,08	1,88	1,40	Basis
Bangunan	0,20	0,17	0,14	0,14	0,19	0,17	Non Basis
Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,23	1,29	1,31	1,30	1,31	1,29	Basis
Angkutan dan Komunikasi	0,38	0,44	0,45	0,39	0,42	0,41	Non Basis
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,69	0,77	0,84	0,79	0,81	0,78	Non Basis
Jasa-Jasa	0,31	0,27	0,31	0,27	0,26	0,28	Non Basis

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 5

Dari Tabel 10. diketahui bahwa sektor perekonomian di Kabupaten Kudus yang menjadi sektor basis selama tahun 2000-2004 adalah sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air minum serta sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai $LQ > 1$, artinya sektor perekonomian tersebut selain dapat memenuhi kebutuhan wilayah sendiri juga dapat mengekspor produknya ke luar wilayah. Sedangkan sektor perekonomian yang merupakan sektor non basis adalah sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor bangunan; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa dengan nilai $LQ \leq 1$. Artinya sektor perekonomian tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri dan belum mampu mengekspor produknya keluar wilayah.

Sektor industri pengolahan merupakan sektor basis yang memiliki nilai LQ rata-rata terbesar yaitu 1,86. Industri yang terkenal di Kabupaten Kudus adalah Industri rokok Djarum, sehingga Kabupaten Kudus terkenal dengan nama kota Kretek. Selain itu di Kabupaten Kudus juga terkenal dengan adanya pabrik kertas terbesar di Asia Tenggara yaitu pabrik kertas Pura. Nilai LQ sektor industri pengolahan mengalami fluktuasi selama tahun 2000-2004. Pada tahun 2000 nilai LQ sektor industri pengolahan

sebesar 1,9 dan mengalami penurunan menjadi 1,88 pada tahun 2001. Hal ini diakibatkan sumbangan sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Kudus mengalami penurunan sebesar 0,17%. Pada tahun 2002 mengalami penurunan nilai LQ kembali menjadi 1,83.

Pada tahun 2003 nilai LQ naik menjadi 1,84. Kenaikan ini diakibatkan peranan sektor industri pengolahan di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan. Tahun 2004 nilai LQ sektor industri pengolahan mengalami penurunan kembali menjadi 1,82 yang merupakan nilai LQ terendah sektor industri pengolahan selama tahun 2000-2004. Hal ini dikarenakan peranan sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Tengah meningkat lebih besar dibanding peranan sektor industri pengolahan di Kabupaten Kudus. Adanya kenaikan ongkos produksi dari pemakaian bahan bakar untuk perusahaan industri serta peningkatan nilai cukai khususnya bagi industri besar juga mengakibatkan penurunan nilai LQ sektor industri pengolahan. Walaupun nilai LQ sektor industri pengolahan cenderung mengalami penurunan selama tahun 2000-2004, akan tetapi sektor industri pengolahan merupakan sektor basis yang mampu mencukupi kebutuhan wilayah sendiri dan mampu mengekspor atau mencukupi kebutuhan daerah lain.

Sektor perekonomian lain yang merupakan sektor basis adalah sektor listrik, gas dan air minum dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1,40. Sektor ini didukung dengan adanya PDAM dan jaringan listrik/PLN. Pada tahun 2000, sektor listrik, gas dan air bersih mempunyai nilai LQ sebesar 0,07 dan mengalami peningkatan berturut-turut menjadi 2,08 pada tahun 2003. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya sumbangan sektor listrik, gas dan air bersih terhadap PDRB Kabupaten Kudus sebagai akibat semakin banyaknya konsumen/pelanggan yang memakai jasa sektor ini seperti semakin banyaknya konsumen yang membutuhkan jasa PDAM, jasa PLN seperti penambahan daya listrik dan pembuatan jaringan listrik baru baik untuk rumah tangga maupun untuk pabrik-pabrik. Akan tetapi pada tahun 2004 nilai LQ sektor listrik, gas dan air bersih turun menjadi 1,88.

Walaupun demikian sektor listrik, gas dan air bersih tetap menjadi sektor basis di Kabupaten Kudus.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran juga merupakan sektor basis yang memiliki nilai LQ rata-rata sebesar 1,29. Sektor ini didukung oleh adanya pasar, toko-toko serta pusat-pusat perbelanjaan. Selain itu juga didukung adanya hotel maupun penginapan-penginapan serta restoran yang mampu memberikan peranan cukup penting bagi perekonomian daerah. Nilai LQ sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami peningkatan dari tahun 2000-2004. Pada tahun 2000, sektor ini memiliki nilai LQ sebesar 1,23 dan meningkat menjadi 1,30 pada tahun 2004. Peningkatan nilai LQ sektor perdagangan, hotel dan restoran disebabkan banyaknya sarana perdagangan seperti pasar-pasar, toko-toko serta pusat-pusat perbelanjaan besar di Kabupaten Kudus. Selain itu juga disebabkan semakin banyaknya rumah makan di Kabupaten Kudus..

Pada Tabel 10. terlihat bahwa sektor pertanian mempunyai nilai LQ rata-rata sebesar 0,17 sehingga sektor pertanian merupakan sektor non basis. Hal ini berarti bahwa sektor pertanian hanya mampu mencukupi kebutuhan wilayah sendiri dan belum mampu untuk mengeksport produknya ke wilayah lain. Pada tahun 2000 sampai tahun 2004 sektor pertanian mengalami penurunan nilai LQ yaitu sebesar 0,19 pada tahun 2000 menurun menjadi 0,16 pada tahun 2004. . Hal ini dikarenakan peranan sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan lebih besar dibanding peranan sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kudus. Selain itu juga disebabkan karena adanya penurunan luas lahan sawah yaitu pada tahun 2002 memiliki luas lahan sawah 21.704 ha menjadi 21.692 ha pada tahun 2004.

Sektor pertambangan dan penggalian juga termasuk sektor non basis yang mempunyai rata-rata nilai LQ rata-rata sebesar 0,03. Selama tahun 2000-2004 sektor pertambangan dan penggalian mempunyai nilai LQ yang tidak berubah yaitu sebesar 0,03. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Kudus

tidak terdapat areal pertambangan tetapi hanya terdapat penggalian tanah yang tidak mengalami perkembangan.

Sektor perekonomian lain yang merupakan sektor non basis adalah sektor bangunan yang mempunyai nilai LQ rata-rata sebesar 0,17. Nilai LQ sektor bangunan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2000 sektor ini mempunyai nilai LQ sebesar 0,20 dan menurun menjadi 0,14 pada tahun 2003. Penurunan ini sebagai akibat penurunan sumbangan sektor bangunan terhadap PDRB di Kabupaten Kudus. Pada tahun 2004 nilai LQ meningkat menjadi 0,19. Kenaikan nilai LQ sektor bangunan dikarenakan semakin besarnya peningkatan peranan sektor bangunan di Kabupaten Kudus dibanding peranan sektor bangunan di provinsi Jawa tengah.

Sektor angkutan dan komunikasi merupakan sektor non basis yang mempunyai nilai LQ rata-rata sebesar 0,41. Nilai LQ sektor angkutan dan komunikasi mengalami fluktuasi selama tahun 2000-2004. Pada tahun 2000 sektor angkutan dan komunikasi mempunyai nilai LQ sebesar 0,38 dan mengalami peningkatan menjadi 0,45 pada tahun 2002. Kemudian pada tahun 2003 turun menjadi 0,39 dan naik menjadi 0,42 pada tahun 2004. Kenaikan nilai LQ sektor angkutan dan komunikasi dikarenakan semakin banyaknya sarana angkutan darat seperti semakin banyaknya angkutan kota dan bus antar daerah serta semakin banyaknya jasa penunjang angkutan berupa biro perjalanan. Semakin banyaknya pelanggan yang membutuhkan jasa pos dan telekomunikasi juga menyebabkan terjadinya peningkatan peranan sektor angkutan dan komunikasi di Kabupaten Kudus sehingga akan terjadi peningkatan nilai LQ sektor angkutan dan komunikasi.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mempunyai nilai LQ rata-rata sebesar 0,78. Meskipun nilai LQ sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mengalami fluktuasi selama tahun 2000-2004. pada tahun 2000 nilai LQ sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 0,69 dan mengalami peningkatan menjadi 0,81 pada tahun 2004.. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan didukung adanya bank, lembaga keuangan, jasa penunjang keuangan, sewa bangunan dan jasa

perusahaan. Peningkatan nilai LQ sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dikarenakan semakin banyaknya lembaga-lembaga keuangan seperti BMT, bank syariah serta koperasi simpan pinjam. Selain itu juga dikarenakan semakin banyaknya jasa yang ditawarkan perusahaan-perusahaan kepada konsumen dan meningkatnya nilai sewa bangunan.

Sektor jasa-jasa merupakan sektor non basis yang mempunyai nilai LQ rata-rata sebesar 0,28. Nilai LQ sektor jasa-jasa mengalami penurunan dari 0,31 pada tahun 2000 menjadi 0,26 pada tahun 2004. Penurunan nilai LQ sektor jasa-jasa disebabkan tidak berkembangnya tempat-tempat hiburan dan rekreasi di Kabupaten Kudus yang mengakibatkan semakin berkurangnya pengunjung di tempat hiburan dan rekreasi.

2. Sektor Pertanian

Berdasarkan nilai *Location Quotient (LQ)*, posisi sub sektor pertanian di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 11. berikut :

Tabel 11. Nilai *Location Quotient (LQ)* Sub Sektor Pertanian di Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004

Sektor Pertanian	2000	2001	2002	2003	2004	Rata-Rata	Keterangan
Tabama	1,04	1,03	1,01	1,02	1,00	1,02	Basis
Tanaman Perkebunan	1,17	1,16	1,24	1,33	1,33	1,25	Basis
Peternakan	1,31	1,38	1,46	1,26	1,43	1,37	Basis
Kehutanan	0,02	0,02	0,02	0,04	0,03	0,03	Non Basis
Perikanan	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06	0,06	Non Basis

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 10

Berdasarkan Tabel 11. dapat diketahui bahwa sub sektor pertanian yang menjadi sektor basis di Kabupaten Kudus adalah sub sektor tabama; sub sektor tanaman perkebunan serta sub sektor peternakan dengan nilai rata-rata LQ masing-masing sebesar 1,02; 1,25 dan 1,37. Sedangkan yang menjadi sub sektor non basis adalah sub sektor kehutanan dan sub sektor perikanan dengan nilai rata-rata LQ masing-masing sebesar 0,03 dan 0,06.

Sub sektor tanaman bahan makanan (tabama) merupakan salah satu sumber daya utama bagi sektor pertanian yang terdiri dari tanaman pangan

yang merupakan bahan makanan pokok dan bahan makanan sehari-hari bagi masyarakat seperti padi sawah, padi gogo, jagung, ketela, sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman pangan lainnya. Dari Tabel 11. terlihat bahwa sub sektor tabama mengalami penurunan nilai LQ selama tahun 2000-2004 yaitu 1,04 pada tahun 2000 menurun menjadi 1,00 pada tahun 2004. Hal ini disebabkan oleh penurunan luas areal panen yang mengakibatkan terjadinya penurunan produksi dari komoditi yang dihasilkan oleh sub sektor tabama yaitu terjadinya penurunan luas panen padi yang mengakibatkan penurunan produksi padi yang merupakan produksi terbesar di Kabupaten Kudus. Pada tahun 2004 produksi padi sebesar 136.548 ton, namun 3,28% lebih rendah dibanding tahun 2003.

Sub sektor tanaman perkebunan mampu menjadi sub sektor basis dengan nilai LQ rata-rata 1,25 yang didukung oleh komoditi-komoditi perkebunan seperti tebu, kapuk, kelapa, kopi dan cengkeh. Selama tahun 2000 sampai 2004 sub sektor tanaman perkebunan mengalami peningkatan yaitu 1,17 pada tahun 2000 meningkat menjadi 1,33 pada tahun 2004. Kenaikan nilai LQ sub sektor tanaman perkebunan dikarenakan semakin meningkatnya peranan sub sektor perkebunan dalam memberikan kontribusinya dalam PDRB sektor pertanian. Tanaman perkebunan yang mengalami peningkatan produksi adalah kapuk yang pada tahun 2003 mempunyai produksi sebesar 312.136 dan naik menjadi 358.954 pada tahun 2004. selain itu cengkeh juga mengalami peningkatan produksi dari tahun 2003 sebesar 23.664 menjadi 28.372 pada tahun 2004.

Sub sektor peternakan merupakan sub sektor basis yang mampu mencukupi kebutuhan daerah setempat dan mampu mengeksport produknya ke daerah lain. Sub sektor peternakan mengalami peningkatan nilai LQ selama lima tahun yaitu 1,31 pada tahun 2000 meningkat menjadi 1,43 pada tahun 2004. Peningkatan nilai LQ dibandingkan tahun sebelumnya didukung dengan semakin meningkatnya kontribusi sub sektor peternakan dalam PDRB sektor pertanian. Jenis ternak yang mengalami peningkatan adalah kambing yang mempunyai produksi sebesar 19.135 pada tahun 2003

meningkat menjadi 35.291 pada tahun 2004. Sedangkan jenis unggas yang mengalami peningkatan adalah ayam ras yaitu ayam pedaging dan ayam petelur yang mempunyai populasi sebesar 623.400 pada tahun 2003 meningkat menjadi 2.593.650 pada tahun 2004.

Sub sektor kehutanan merupakan sub sektor non basis yang mempunyai rata-rata nilai LQ paling rendah yaitu 0,03. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari luas hutan digunakan sebagai hutan lindung, khususnya wilayah hutan Gunung Muria. Pada tahun 2004, dari luas seluruh hutan di Kabupaten Kudus yaitu seluas 3.908,3 ha; 2.334,8 ha digunakan sebagai hutan lindung yaitu di wilayah hutan Gunung Muria. Sedangkan 1.573,5 ha digunakan sebagai hutan produksi yaitu wilayah Gunung Patiayam. Hasil dari hutan produksi berupa kayu jati, kayu rimba, kayu bakar jati, kayu bakar rimba serta getah pinus.

Sub sektor perikanan belum mampu menjadi sektor basis selama lima tahun ini. Sub sektor ini mencakup perikanan darat yang terdiri dari kolam/budidaya, perairan umum dan pembenihan. Nilai LQ sub sektor perikanan dari tahun 2000 sampai tahun 2004 tidak mengalami peningkatan. Komoditas perikanan yang dibudidayakan adalah lele dumbo, tawes, mujahir, nila, karper, bawal dan gurami, dimana komoditas yang menjadi andalan adalah ikan lele dumbo. Pada tahun 2004 produksi ikan budidaya/kolam sebanyak 1.478,54 kwintal, naik 1,03% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan produksi ikan perairan umum di Kabupaten Kudus sebanyak 572,79 kwintal, menurun 12,16% dibanding tahun sebelumnya. Komoditas terbesar produksinya adalah ikan lele dumbo sebanyak 1.396,79 kwintal atau 94,45% dari total produksi. Produksi lele dumbo mengalami kenaikan sebesar 11,08% dari tahun sebelumnya.

B. Analisis Posisi Sektor Pertanian dan Sub Sektor Pertanian di Masa yang Akan datang

1. Sektor Perekonomian

Metode *Dynamic Location Quotient (DLQ)* adalah metode yang digunakan untuk mengetahui perubahan posisi sektor perekonomian di masa yang akan datang. Suatu sektor pada saat ini menjadi sektor basis belum tentu akan menjadi sektor basis di masa yang akan datang. Sebaliknya sektor yang belum menjadi sektor basis pada saat ini mungkin akan menjadi sektor basis di masa yang akan datang. Apabila nilai $DLQ > 1$ maka suatu sektor perekonomian merupakan sektor basis di masa yang akan datang, dan apabila $DLQ \leq 1$ maka suatu sektor perekonomian merupakan sektor non basis di masa yang akan datang.

Berdasarkan nilai DLQ, perubahan posisi sektoral di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 12. :

Tabel 12. Nilai *Dynamic Location Quotient (DLQ)* Sektor Perekonomian Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004

Sektor Perekonomian	DLQ	Keterangan
Pertanian	28,40	Basis
Pertambangan dan Penggalian	0,24	Non Basis
Industri Pengolahan	0,37	Non Basis
Listrik, gas dan Air Minum	14,71	Basis
Bangunan	0,06	Non Basis
Perdagangan, Hotel Dan Restoran	9,90	Basis
Pengangkutan dan Komunikasi	1,41	Basis
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	16,29	Basis
Jasa-Jasa	0,03	Non Basis

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 14

Dari Tabel 12. dapat diketahui bahwa sektor perekonomian yang dapat diperkirakan menjadi sektor basis di masa yang akan datang adalah sektor pertanian; sektor listrik, gas dan air minum; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor

bangunan dan sektor jasa-jasa termasuk sektor yang tidak dapat diharapkan basis di masa yang akan datang.

Apabila melihat nilai LQ hanya sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air minum serta sektor perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan sektor basis. Namun sesuai analisis DLQ ada lima sektor yang dapat diunggulkan di tahun yang akan datang.

Sektor pertanian yang merupakan sektor non basis ($LQ \leq 1$) pada saat ini dan bisa diharapkan menjadi basis di masa yang akan datang dimana nilai DLQ > 1 yaitu 28,40. Hal ini dikarenakan adanya dukungan dari pemerintah dengan memperhatikan perkembangan sektor pertanian yang dapat meningkatkan nilai tambah, daya saing serta meningkatkan pendapatan sektor pertanian.

Sektor industri pengolahan yang pada saat ini merupakan sektor basis ($LQ > 1$) tetapi tidak bisa diharapkan menjadi sektor basis di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan semakin menurunnya pertumbuhan sektor industri pengolahan yang disebabkan oleh pabrik-pabrik yang mulai bangkrut, serta mulai tutupnya usaha industri kecil. Selain itu semakin rendahnya kualitas tenaga kerja serta tingginya nilai cukai menyebabkan sektor industri pengolahan tidak mampu mengeksport produknya ke daerah lain.

Sesuai dengan analisis DLQ, sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor non basis dengan nilai DLQ 1,41. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan transportasi dan komunikasi. Semakin banyaknya sarana transportasi dan komunikasi seperti terminal, angkutan kota, wartel, kantor pos, internet serta perusahaan telepon seluler mendukung sektor ini untuk menjadi sektor basis di masa yang akan datang.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dapat diharapkan untuk menjadi sektor basis di masa yang akan datang dengan nilai DLQ 16,29. hal ini dikarenakan semakin banyaknya bank-bank yang dibutuhkan masyarakat baik untuk menyimpan uang atau meminjam uang. Selain itu

banyaknya persewaan-persewaan serta jasa-jasa yang ditawarkan oleh perusahaan yang sangat dibutuhkan masyarakat.

2. Sektor Pertanian

Berdasarkan nilai DLQ, perubahan posisi sektor pertanian di masa yang akan datang di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 13. :

Tabel 13. Nilai *Dynamic Location Quotient (DLQ)* Sub Sektor Pertanian Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004

Sektor Pertanian	Nilai DLQ	Keterangan
Tabama	0,33	Non Basis
Tanaman Perkebunan	5238,80	Basis
Peternakan	1175,84	Basis
Kehutanan	-25590,74	Non Basis
Perikanan	547,96	Basis

Sumber : Diadopsi dari lampiran 19

Dari Tabel 13. dapat diketahui bahwa sub sektor pertanian yang dapat diharapkan menjadi basis di masa yang akan datang adalah sub sektor tanaman perkebunan; sub sektor peternakan dan sub sektor perikanan. Hal ini disebabkan laju pertumbuhan masing-masing sub sektor terhadap PDRB Kabupaten Kudus lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan sub sektor tersebut terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan sub sektor tanaman bahan makanan (tabama) dan sub sektor kehutanan tidak dapat diharapkan menjadi basis di masa yang akan datang.

Berdasarkan nilai LQ, sub sektor tabama merupakan sub sektor basis. Namun di tahun yang akan datang, sub sektor tabama tidak bisa diharapkan untuk menjadi sub sektor basis di Kabupaten Kudus. Hal ini dikarenakan semakin menurunnya produksi tanaman bahan pangan seperti padi, ketela pohon, kacang tanah dan kedelai. Penurunan ini dikarenakan semakin menurunnya luas panen yang mengakibatkan penurunan produksi. Sub sektor tabama memiliki nilai DLQ sebesar 0,33.

Sub sektor tanaman perkebunan dapat diharapkan menjadi sub sektor basis di masa yang akan datang. Sub sektor tanaman perkebunan memiliki nilai DLQ terbesar dalam memberikan kontribusinya terhadap sektor pertanian yaitu sebesar 5238,80. Hal ini dikarenakan laju

pertumbuhan sub sektor perkebunan di Kabupaten Kudus lebih besar dibanding laju pertumbuhan sub sektor perkebunan di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga didukung semakin meningkatnya hasil perkebunan di Kabupaten Kudus seperti tebu, kapuk, kopi cengkeh dan panili yang mampu mengimbangi penurunan produksi kapas, kelapa dan mete.

Sub sektor peternakan memiliki nilai DLQ sebesar 1175,84 sehingga bisa diharapkan menjadi sub sektor basis di masa yang akan datang. Hal ini didukung semakin meningkatnya populasi ternak di Kabupaten Kudus seperti sapi, sapi perah dan kambing. Begitu juga dengan sub sektor perikanan yang bisa diharapkan menjadi sub sektor basis di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya produksi perikanan perairan umum dan usaha pembenihan ikan di Kabupaten Kudus. Produksi ikan perairan umum yang mengalami peningkatan adalah produksi ikan tawes, gabus dan rucah.

Sub sektor kehutanan tidak bisa diharapkan menjadi sub sektor basis di masa yang akan datang yang ditunjukkan dari nilai DLQ sub sektor kehutanan yaitu sebesar -25590,74. Hal ini dikarenakan pada tahun 1998-2000 terjadi penjarahan hutan yang mengakibatkan hasil produksi hutan di Kabupaten Kudus berkurang. Pada tahun 2001 mulai dilakukan penanaman hutan kembali, dan sampai tahun 2004 hutan di Kabupaten Kudus belum dapat menghasilkan produksi.

C. Analisis Identifikasi Sektor Pertanian dan Sub Sektor Pertanian Untuk Masa Sekarang dan Masa Depan

Analisis gabungan LQ dan DLQ digunakan untuk mengetahui perubahan posisi dan potensi baik sektor maupun sub sektor untuk masa yang akan datang dengan kriteria sebagai berikut :

- $LQ > 1$ dan $DLQ > 1$, berarti sektor pertanian tetap menjadi basis
- $LQ > 1$ dan $DLQ \leq 1$, berarti sektor pertanian mengalami perubahan posisi dari basis menjadi non basis sehingga tidak dapat diharapkan menjadi basis di tahun-tahun yang akan datang

- $LQ \leq 1$ dan $DLQ > 1$, berarti sektor pertanian telah mengalami perubahan posisi dari non basis menjadi sektor basis sehingga dapat diharapkan basis di tahun-tahun mendatang
- $LQ \leq 1$ dan $DLQ \leq 1$, berarti sektor pertanian tetap non basis

1. Sektor Perekonomian

Tabel 14. Perubahan Posisi Sektor Perekonomian Kabupaten Kudus

Sektor Perekonomian	Nilai Rata-Rata LQ	Nilai DLQ	Keterangan
Pertanian	0,17	28,40	Non Basis – Basis
Pertambangan dan Pengalihan	0,03	0,24	Non Basis - Non Basis
Industri Pengolahan	1,86	0,37	Basis – Non Basis
Listrik, gas dan Air Minum	1,40	14,71	Basis - Basis
Bangunan	0,17	0,06	Non Basis - Non Basis
Perdagangan, Hotel Dan Restoran	1,29	9,90	Basis - Basis
Pengangkutan dan Komunikasi	0,41	1,41	Non Basis – Basis
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,78	16,29	Non Basis – Basis
Jasa-Jasa	0,28	0,03	Non Basis - Non Basis

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 22

Dari Tabel 14. diketahui bahwa sektor pertanian; sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mengalami perubahan posisi dari non basis menjadi basis. Sedangkan sektor industri pengolahan mengalami perubahan posisi dari sektor basis menjadi non basis.

Sektor pertanian mengalami perubahan posisi dari sektor non basis menjadi sektor basis. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan produksi perkebunan, peternakan dan perikanan yang merupakan bagian dari sektor pertanian. Selain itu juga adanya perhatian pemerintah terhadap pertumbuhan sektor pertanian seperti adanya penyuluhan terhadap petani tentang cara bertani yang baik untuk peningkatan pengetahuan petani tentang pertanian dan adanya subsidi dari pemerintah terhadap sektor pertanian.

Sektor industri pengolahan mengalami perubahan posisi dari basis menjadi non basis dikarenakan kelemahan pada industri kecil yang merupakan bagian dari industri yang ada di Kabupaten Kudus, seperti terbatasnya sumber daya manusia yang profesional, terbatasnya modal bagi industri kecil, jaringan pemasaran yang kecil.

Sektor pengangkutan dan komunikasi juga mengalami perubahan posisi dari sektor non basis menjadi sektor basis. Hal ini didukung semakin meningkatnya sarana komunikasi dan transportasi yang semakin diminati oleh masyarakat.

Selain itu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan juga mengalami perubahan posisi dari sektor non basis menjadi sektor basis. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan didukung semakin banyaknya lembaga keuangan di Kabupaten Kudus serta perusahaan-perusahaan yang menawarkan jasa kepada masyarakat.

Sektor yang tidak mengalami perubahan posisi di masa yang akan datang adalah sektor pertambangan dan penggalian; sektor bangunan dan sektor jasa-jasa yaitu tetap non basis. Sedangkan sektor yang tetap basis di masa yang akan datang adalah sektor listrik, gas dan air serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Tabel 15. Pengelompokan Sektor Perekonomian Berdasarkan Nilai LQ dan DLQ

	DLQ \leq 1	DLQ $>$ 1
LQ \leq 1	1. Pertambangan dan penggalian 2. Bangunan 3. Jasa-jasa	1. Pertanian 2. Pengangkutan dan komunikasi 3. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
LQ $>$ 1	1. Industri pengolahan	1. Listrik, gas dan air minum 2. Perdagangan, hotel dan restoran

Sumber : Diolah dari Lampiran 22

Keterangan :

A Artinya sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan dan sektor jasa-jasa merupakan sektor yang pada saat sekarang merupakan

sektor non basis dan di masa depan sektor tersebut tetap menjadi sektor non basis atau tidak berpotensi menjadi sektor basis (tidak berpotensi).

- B Artinya sektor pertanian, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan adalah merupakan sektor yang pada saat sekarang merupakan sektor non basis tapi di masa depan sektor tersebut mempunyai potensi menjadi sektor basis (berpotensi).
- C Artinya sektor industri pengolahan adalah merupakan sektor yang pada saat sekarang merupakan sektor basis tapi di masa depan sektor tersebut merupakan sector non basis atau tidak berpotensi menjadi sektor basis (tidak berpotensi).
- D Artinya sektor listrik, gas dan air minum dan sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah merupakan sektor yang pada saat sekarang merupakan sektor basis dan di masa depan sektor tersebut mempunyai potensi menjadi sektor basis (berpotensi).

2. Sektor Pertanian

Tabel 16. Perubahan Posisi Sub Sektor Pertanian di Kabupaten Kudus

Sektor Pertanian	Nilai LQ	Nilai DLQ	Keterangan
Tabama	1,02	0,33	Basis – Non Basis
Tanaman Perkebunan	1,25	5238,80	Basis - Basis
Peternakan	1,37	1175,84	Basis - Basis
Kehutanan	0,03	-25590,74	Non basis - Non Basis
Perikanan	0,06	547,96	Non Basis – Basis

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 23

Dari Tabel 16. dapat diketahui bahwa sub sektor yang mengalami perubahan posisi adalah sub sektor perikanan yaitu dari non basis menjadi basis, serta sub sektor tanaman bahan makanan (tabama) yang mengalami perubahan posisi dari basis menjadi non basis. Meskipun sekarang sub sektor perikanan merupakan sub sektor non basis namun dapat diharapkan menjadi basis di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan produksi perikanan khususnya perikanan perairan umum

seperti tawes, gabus dan rucah. Sub sektor tabama yang merupakan sub sektor basis di masa sekarang tidak bisa diharapkan basis di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan semakin menurunnya produksi dari sub sektor tabama yaitu terjadi penurunan produksi jagung, ketela rambat, kacang tanah dan kedelai. Sub sektor yang tidak mengalami perubahan adalah sub sektor tanaman perkebunan dan sub sektor peternakan yang tetap merupakan sub sektor basis serta sub sektor kehutanan yang tetap merupakan sub sektor non basis.

Tabel 17. Pengelompokan Sektor Pertanian Berdasarkan Nilai LQ dan DLQ

	DLQ \leq 1	DLQ $>$ 1
LQ \leq 1	1. Kehutanan	1. Perikanan
LQ $>$ 1	1. Tabama	1. Tanaman perkebunan 2. Perikanan

Sumber : Diolah dari Lampiran 23

Keterangan :

- A Artinya sub sektor kehutanan adalah merupakan sub sektor yang pada saat sekarang merupakan sub sektor non basis dan di masa depan sub sektor kehutanan tetap merupakan sub sektor non basis atau tidak berpotensi menjadi sub sektor basis (tidak berpotensi).
- B Artinya sub sektor perikanan adalah merupakan sub sektor yang pada saat sekarang merupakan sub sektor non basis tapi di masa depan sub sektor perikanan mempunyai potensi menjadi sub sektor basis (berpotensi).
- C Artinya sub sektor tabama adalah merupakan sub sektor yang pada saat sekarang merupakan sub sektor basis tapi di masa depan sub sektor tabama merupakan sub sektor non basis atau tidak mempunyai potensi menjadi sub sektor basis (tidak berpotensi).
- D Artinya sub sektor tanaman perkebunan dan sub sektor perikanan adalah merupakan sub sektor yang pada saat sekarang merupakan sub sektor basis dan di masa depan sub sektor tersebut tetap menjadi sub

sektor basis atau mempunyai potensi menjadi sub sektor basis (berpotensi).

D. Analisis Peranan Sektor Pertanian

Peranan merupakan fungsi suatu kegiatan ekonomi. Dalam penelitian ini kontribusi sektor dan sub sektor pertanian diukur dengan angka pengganda pendapatan dan angka pengganda tenaga kerja.

1. Angka Pengganda Pendapatan

Tabel 18. Angka Pengganda Pendapatan dan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Perekonomian Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004

Tahun	Y	YP	MS	▲YP	▲Y
2000	7430608,48	323476,80	22,97	-	-
2001	10093486,90	391282,47	25,80	67805,67	1749108,95
2002	12616399,78	485864,95	25,97	94582,48	2456012,40
2003	16130789,46	533657,71	30,23	47792,76	1444624,40
2004	18577048,92	627115,13	29,62	93457,42	2768491,69
Rata-rata			26,92		

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 20

Dari Tabel 18. diketahui bahwa nilai angka pengganda pendapatan tertinggi pada tahun 2003 yaitu sebesar 30,23 artinya bahwa setiap pendapatan satu rupiah sektor pertanian akan mempengaruhi perubahan pendapatan wilayah Kabupaten Kudus sebesar Rp 30,23. Pada tahun 2001 terjadi peningkatan pendapatan sektor pertanian yaitu sebesar Rp 67.805,67 dengan angka pengganda pendapatan sebesar 25,80 sehingga mengakibatkan peningkatan pendapatan total sebesar Rp 1.749.108,95. Walaupun terjadi penurunan nilai angka pengganda pendapatan pada tahun 2004, namun terjadi peningkatan pendapatan total wilayah di Kabupaten Kudus dan peningkatan pendapatan sektor pertanian di Kabupaten Kudus.

2. Angka pengganda Tenaga Kerja

Tabel 19. Angka Pengganda Tenaga Kerja dan Kontribusi Tenaga Kerja Sektor Pertanian terhadap Total Tenaga Kerja di Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004

Tahun	N	NP	K	▲NP	▲N
2000	366144,00	61702,00	5,93	-	-
2001	381176,00	61865,00	6,16	163,00	1004,31
2002	366892,00	68765,00	5,34	6900,00	36814,58
2003	354842,00	57411,00	6,18	-11354,00	-70176,03
2004	357752,00	57835,00	6,19	424,00	2622,75
Rata-rata			5,96		

Sumber : Diadopsi dari Lampiran 21

Dari Tabel 19. dapat diketahui bahwa kontribusi tenaga kerja sektor pertanian terbesar terjadi pada tahun 2004 dengan angka pengganda tenaga kerja sebesar 6,19. Pada tahun 2001 terjadi peningkatan tenaga kerja sebesar 163 orang dengan angka pengganda tenaga kerja sebesar 6,16 sehingga mengakibatkan peningkatan tenaga kerja total sebesar 10.004,31 orang. Angka pengganda tenaga kerja terbesar terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 6,19 dimana terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja sektor pertanian sebesar 424 orang dan peningkatan jumlah total tenaga kerja di Kabupaten Kudus sebesar 2.622,75 orang. Sedangkan angka pengganda tenaga kerja terkecil terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 5,34 dimana jumlah tenaga kerja sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 6.900 orang dan peningkatan jumlah total tenaga kerja di Kabupaten Kudus sebesar 36.814,58 orang. Pada tahun 2003 nilai angka pengganda tenaga kerja sebesar 6,18 tetapi jumlah tenaga kerja sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 11.354 orang dan terjadi penurunan jumlah total tenaga kerja di Kabupaten Kudus sebesar 70.176,03 orang.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis LQ dan DLQ Kabupaten Kudus , dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sektor perekonomian yang menjadi sektor basis pada tahun 2000-2004 yaitu sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan yang menjadi sektor non basis adalah sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor bangunan; sektor angkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa.
2. Sektor perekonomian yang dapat diharapkan menjadi basis di masa yang akan datang adalah sektor pertanian; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor angkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sektor yang mengalami perubahan posisi adalah sektor pertanian; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang mengalami perubahan posisi dari non basis menjadi basis, serta sektor industri pengolahan dan sektor pengangkutan, hotel dan restoran yang mengalami perubahan posisi dari basis menjadi non basis.
3. Sub sektor pertanian yang menjadi sub sektor basis pada tahun 2000-2004 adalah sub sektor tabama; sub sektor tanaman perkebunan dan sub sektor peternakan. Sedangkan sub sektor pertanian yang menjadi sub sektor non basis adalah sub sektor perikanan dan sub sektor kehutanan.
4. Sub sektor pertanian yang dapat diharapkan menjadi basis di masa yang akan datang adalah sub sektor tanaman perkebunan; sub sektor peternakan dan sub sektor perikanan. Sub sektor pertanian yang mengalami perubahan posisi adalah sub sektor tabama yang mengalami perubahan posisi dari basis menjadi non basis dan sub sektor perikanan yang mengalami perubahan posisi dari non basis menjadi basis.

5. Peranan sektor pertanian dari sisi pendapatan di Kabupaten Kudus dapat dilihat melalui angka pengganda pendapatan yaitu sebesar 26,92 yang artinya setiap Rp 100,00 pendapatan sektor pertanian akan mengakibatkan perubahan total pendapatan wilayah di Kabupaten Kudus sebesar Rp 2.692,00.
6. Peranan sektor pertanian dari sisi tenaga kerja dapat dilihat dari nilai rata-rata angka pengganda tenaga kerja yaitu sebesar 5,96 yang artinya setiap perubahan 100 tenaga kerja sektor pertanian akan mengakibatkan perubahan sebesar 596 total tenaga kerja di Kabupaten Kudus.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut : Mengingat sektor pertanian merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan, sedangkan di Kabupaten Kudus sektor pertanian merupakan sektor non basis, hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang identifikasi sektor pertanian dan faktor-faktor penyebab terjadinya pergeseran posisi sektor pertanian dan sub sektor pertanian di Kabupaten Kudus.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. <http://sidoarjo.go.id/>. Didownload pada tanggal 28 Desember 2005.
- Arsyad, L. 1992. *Ekonomi Pembangunan Edisi Ke-2*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- . 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE. Yogyakarta.
- Basri, F. 2002. *Perekonomian Indonesia, Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*. Erlangga. Jakarta.
- Budiharsono, S. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Budiman, A. 1996. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Daniel, M. 2002. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Dewi, D K. 2004. *Analisis Penentuan Sektor Pertanian Unggulan dalam Perekonomian Wilayah Kabupaten Klaten*. Skripsi. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. FP UNS. Surakarta.
- Djojodipuro, M. 1994. *Pengantar Ekonomi untuk Perencanaan*. UII Press. Jakarta.
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga. Jakarta.
- Indriyani, C. 2004. *Peranan Sektor Padi Dalam Pembangunan Wilayah di Kabupaten Kudus (dengan Pendekatan Analisis Input-Output)*. Skripsi. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. FP UNS. Surakarta.
- Khairuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.
- Puspowati, C. 2004. *Identifikasi Sektor Pertanian sebagai Sektor Unggulan di Kabupaten Kebumen*. Skripsi. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. FP UNS. Surakarta.
- Riyadi dan Brathakusuma. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Gramedia. Jakarta.

- Setyowati, N. 2004. *Analisis Ekonomi Basis Sektor Pertanian di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten*. Skripsi. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. FP UNS. Surakarta.
- Sicat, G.P. 1991. *Ilmu Ekonomi untuk Konteks Indonesia*. LP3ES. Jakarta.
- Singarimbun, M. 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.
- Soekarni, M dan Mahmud, T. 2000. Studi Kelayakan Ekonomi Pembentukan Provinsi Baru: Kasus Banten. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol VIII Tahun 2000*. Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Soekartawi. 1995. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan*. CV. Rajawali. Jakarta.
- Sukirno, S. 1985. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Kebijakan*. Borta Gorat. Medan.
- Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Tarsito. Bandung.
- _____ . 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Tarsito. Bandung.
- Suroto. 1992. *Ekonomi Indonesia*. UGM Press. Yogyakarta.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan : Problematika Dan Pendekatan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Suyatno. 2002. *Analisis Economic Base Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tingkat II Wonogiri*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 1, No. 2, Desember 2000:144-159*
- Tarigan, R. 2000. *Pembangunan Ekonomi Jilid I*. Erlangga. Jakarta.
- _____ . 2002. *Perencanaan Pembangunan Wilayah Pendekatan Ekonomi dan Ruang*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.

Lampiran 1

Tabel PDRB Kabupaten Kudus Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000-2004 (dalam jutaan rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2000	2001	2002	2003	2004
Pertanian	323476,80	364919,59	418794,21	445467,23	503906,22
Pertambangan dan Penggalian	2456,70	2729,81	2960,53	3471,28	3694,23
Industri Pengolahan	4393414,92	5176644,96	5843480,20	6743293,56	7336574,50
Listrik, Gas dan Air Bersih	39217,66	56962,97	84667,95	114462,10	121910,15
Bangunan	67213,33	73838,50	80888,23	99481,55	126047,21
Perdagangan, hotel dan restoran	2084430,00	2433644,60	2754631,64	3150080,03	3437590,67
Angkutan dan Komunikasi	125909,48	164354,37	192133,19	213113,66	253090,02
Keuangan, Persewa dan Jasa Perusahaan	195159,21	246400,26	295243,23	326382,94	362825,64
Jasa-Jasa	199330,38	235293,26	272250,85	308201,48	328260,59
Jumlah	7430608,48	8754788,32	9945050,03	11403953,83	12473899,23

Lampiran 2

Tabel Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004 (%)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2000	2001	2002	2003	2004
Pertanian	323,63	347,01	375,46	387,70	402,76
Pertambangan dan Penggalian	164,91	174,91	185,14	204,94	226,23
Industri Pengolahan	239,51	275,33	301,49	337,91	358,45
Listrik, Gas dan Air Bersih	198,42	240,32	336,29	441,00	446,88
Bangunan	234,10	248,49	263,06	293,91	362,11
Perdagangan, hotel dan restoran	238,60	277,86	305,32	340,53	354,39
Angkutan dan Komunikasi	233,80	294,66	328,62	335,45	345,08
Keuangan, Persewa dan Jasa Perusahaan	233,66	274,84	308,32	327,17	340,80
Jasa-Jasa	244,77	280,93	317,03	350,44	363,04
PDRB	241,51	278,34	306,04	340,59	358,88

Lampiran 3

Tabel PDRB Kabupaten Kudus Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 pada Tahun 2000-2004 (dalam jutaan rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2000	2001	2002	2003	2004
Pertanian	323476,80	391282,47	485864,95	533657,71	627115,13
Pertambangan dan Penggalian	2456,70	2895,34	3323,71	4313,89	5067,89
Industri Pengolahan	4393414,92	5950839,87	7355646,30	9513700,17	10979897,00
Listrik, Gas dan Air Bersih	39217,66	68991,74	143498,56	254398,68	274565,10
Bangunan	67213,33	78377,31	90894,74	124898,00	194972,04
Perdagangan, hotel dan restoran	2084430,00	2834084,19	3524912,54	4495795,28	5105816,25
Angkutan dan Komunikasi	125909,48	207137,12	270054,79	305769,79	373551,34
Keuangan, Persewa dan Jasa Perusahaan	195159,21	289825,59	389580,56	457000,37	529191,89
Jasa-Jasa	199330,38	270053,26	352623,63	441255,57	486872,27
Jumlah	7430608,48	10093486,90	12616399,78	16130789,46	18577048,92

Lampiran 4

Tabel PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 pada Tahun 2000-2004 (dalam jutaan rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2000	2001	2002	2003	2004
Pertanian	26124205,65	26417424,36	27725086,08	27157595,62	28606237,28
Pertambangan dan Penggalian	1100330,84	1190371,57	1227651,53	1295356,44	1330759,58
Industri Pengolahan	35688248,50	37164561,05	39193652,64	41347172,12	43995611,83
Listrik, Gas dan Air Bersih	867870,50	872603,67	975868,80	980306,54	1065114,58
Bangunan	5262490,31	5532343,12	6116817,45	6907250,46	7448715,40
Perdagangan, hotel dan restoran	26065270,79	25813343,84	26289742,59	27666472,01	28394472,63
Angkutan dan Komunikasi	5181707,80	5577204,52	5872915,88	6219922,79	6510447,43
Keuangan, Persewa dan Jasa Perusahaan	4340625,96	4420388,39	4524128,37	4650861,80	4775113,99
Jasa-Jasa	10070554,46	11828159,77	11112677,79	12941524,67	13663399,59
Jumlah	114701304,81	118816400,29	123038541,13	129166462,45	135789872,31

Lampiran 5

Tabel Nilai LQ Sektor Perekonomian Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004

Lapangan usaha	Tahun					Rata-rata	Keterangan
	2000	2001	2002	2003	2004		
Pertanian	0,19	0,17	0,17	0,16	0,16	0,17	Non Basis
Pertambangan dan Penggalian	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,33	Non Basis
Industri Pengolahan	1,90	1,88	1,83	1,84	1,82	1,86	Basis
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,70	0,93	1,43	2,08	1,88	1,40	Basis
Bangunan	0,20	0,17	0,14	0,14	0,19	0,17	Non Basis
Perdagangan, hotel dan restoran	1,23	1,29	1,31	1,30	1,31	1,29	Basis
Angkutan dan Komunikasi	0,38	0,44	0,45	0,39	0,42	0,41	Non Basis
Keuangan, Persewa dan Jasa	0,69	0,77	0,84	0,79	0,81		
Perusahaan						0,78	Non Basis
Jasa-Jasa	0,31	0,27	0,31	0,27	0,26	0,28	Non Basis

Lampiran 6

Tabel PDRB Sub Sektor Pertanian Kabupaten Kudus ADHB Tahun 2000-2004 (dalam jutaan rupiah)

Sektor Pertanian	Tahun				
	2000	2001	2002	2003	2004
Tabama	237777,55	265983,42	294578,04	316024,04	352421,26
Tanaman Perkebunan	36820,28	44304,22	52602,64	61508,78	67825,14
Peternakan	47494,46	52811,33	69357,51	65566,33	81353,24
Kehutanan	163,94	190,33	210,66	224,41	242,76
Perikanan	1220,57	1630,29	2045,36	2143,67	2063,83

Lampiran 7

Tabel Indeks Harga Implisit Sub Sektor Pertanian Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004 (%)

Sektor Pertanian	Tahun				
	2000	2001	2002	2003	2004
Tabama	359,67	387,63	414,42	418,82	437,08
Tanaman Perkebunan	217,81	250,02	283,09	299,03	300,11
Peternakan	291,66	292,22	329,12	363,27	384,59
Kehutanan	346,08	371,65	384,56	422,59	495,47
Perikanan	200,73	233,13	271,94	277,33	303,12

Lampiran 8

Tabel PDRB Sub Sektor Pertanian Kabupaten Kudus ADHK 2000 pada Tahun 2000-2004 (dalam jutaan rupiah)

Sektor Pertanian	Tahun				
	2000	2001	2002	2003	2004
Tabama	237777,55	246797,87	255660,64	271391,93	290004,93
Tanaman Perkebunan	36820,28	38596,52	40472,57	44802,29	49225,26
Peternakan	47494,46	52710,12	61463,33	52641,49	61695,54
Kehutanan	163,94	177,24	189,58	183,78	169,57
Perikanan	1220,57	1403,72	1509,76	1551,58	1366,70

Lampiran 9

Tabel PDRB Sub Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah ADHK 2000 pada Tahun 2000-2004 (dalam jutaan rupiah)

Sektor Pertanian	Tahun				
	2000	2001	2002	2003	2004
Tabama	18491012,77	18558288,15	19610997,42	19575711,22	20679734,58
Tanaman Perkebunan	2546825,16	2584584,25	2515998,01	2460627,43	2634349,91
Peternakan	2919465,77	2967146,50	3249634,00	3055450,68	3076706,09
Kehutanan	582559,42	563216,42	595594,79	352329,24	468457,78
Perikanan	1584342,53	1744189,04	1752861,86	1713477,05	1746988,92

Lampiran 10

Tabel Nilai LQ Sub Sektor Pertanian Kabupaten Kudus

Sektor Pertanian	Tahun					Rata-rata	Keterangan
	2000	2001	2002	2003	2004		
Tabama	1,04	1,03	1,01	1,02	1,00	1,02	Basis
Tanaman Perkebunan	1,17	1,16	1,24	1,33	1,33	1,25	Basis
Peternakan	1,31	1,38	1,46	1,26	1,43	1,37	Basis
Kehutanan	0,02	0,02	0,02	0,04	0,03	0,03	Non Basis
Perikanan	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06	0,06	Non Basis

Lampiran 11

Tabel Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus ADHB pada Tahun 2000-2004 (%)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2000	2001	2002	2003	2004
Pertanian	24,13	12,81	14,76	6,37	13,12
Pertambangan dan Penggalian	5,90	11,12	8,45	17,25	6,42
Industri Pengolahan	8,37	17,83	12,88	15,40	8,80
Listrik, Gas dan Air Bersih	26,78	45,25	48,64	35,19	6,51
Bangunan	3,75	9,86	9,55	22,99	26,70
Perdagangan, hotel dan restoran	7,98	16,75	13,19	14,36	9,13
Angkutan dan Komunikasi	17,14	30,53	16,90	10,92	18,76
Keuangan, Persewa dan Jasa Perusahaan	6,24	26,26	19,82	10,55	11,17
Jasa-Jasa	4,27	18,04	15,71	13,20	6,51
PDRB	8,87	17,82	13,60	14,67	9,38

Lampiran 12

Tabel Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus ADHK 2000 pada Tahun 2000-2004 (%)

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata (gi)	$(1+g_{ij})/(1+g_j)$
	2000	2001	2002	2003	2004		
Pertanian	24,13	11,95	12,72	5,32	10,54	12,93	1,23
Pertambangan dan Penggalian	5,90	10,48	7,53	13,88	4,68	8,49	0,84
Industri Pengolahan	8,37	15,51	10,23	10,92	5,88	10,18	0,98
Listrik, Gas dan Air Bersih	26,78	37,36	28,70	15,83	2,89	22,31	2,05
Bangunan	3,75	9,29	8,50	18,31	17,26	11,42	1,09
Perdagangan, hotel dan restoran	7,98	14,38	10,31	10,06	6,15	9,78	0,95
Angkutan dan Komunikasi	17,14	24,22	12,02	7,61	12,71	14,74	1,39
Keuangan, Persewa dan Jasa Perusahaan	6,24	22,33	15,02	7,53	7,66	11,76	1,12
Jasa-Jasa	4,27	15,72	12,13	9,22	4,39	9,15	0,89
PDRB	8,87	15,46	10,73	10,40	6,31	10,36	

Lampiran 13

Tabel Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK 2000 pada Tahun 2000-2004 (%)

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata (Gi)	$(1+G_{ij})/(1+G_j)$
	2000	2001	2002	2003	2004		
Pertanian	-	1,12	4,95	-2,05	5,33	2,34	0,63
Pertambangan dan Penggalian	-	8,18	3,13	5,51	2,73	4,89	1,11
Industri Pengolahan	-	4,14	5,46	5,49	6,41	5,38	1,20
Listrik, Gas dan Air Bersih	-	0,55	11,83	0,45	8,65	5,37	1,20
Bangunan	-	5,13	10,56	12,92	7,84	9,11	1,90
Perdagangan, hotel dan restoran	-	-0,97	1,85	5,24	2,63	2,19	0,60
Angkutan dan Komunikasi	-	7,63	5,30	5,91	4,67	5,88	1,29
Keuangan, Persewa dan Jasa Perusahaan	-	1,84	2,35	2,80	2,67	2,42	0,64
Jasa-Jasa	-	17,45	-6,05	16,46	5,58	8,36	1,76
PDRB		3,59	3,55	4,98	5,13	4,31	

Lampiran 14

Tabel Nilai DLQ Sektor Perekonomian Kabupaten Kudus Tahun 200-2004

Lapangan Usaha	Nilai DLQ	Keterangan
Pertanian	28,40	Basis
Pertambangan dan Penggalian	0,24	Non Basis
Industri Pengolahan	0,37	Non Basis
Listrik, Gas dan Air Bersih	14,71	Basis
Bangunan	0,06	Non Basis
Perdagangan, hotel dan restoran	9,90	Basis
Angkutan dan Komunikasi	1,41	Basis
Keuangan, Persewa dan Jasa Perusahaan	16,29	Basis
Jasa-Jasa	0,03	Non Basis

Lampiran 15

Tabel Laju Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian Kabupaten Kudus ADHB pada Tahun 2000-2004

Sektor	Tahun				
	2000	2001	2002	2003	2004
Pertanian					
Tabama	23,75	11,86	10,75	7,28	11,52
Tanaman	29,07	20,33	18,73	16,93	10,27
Perkebunan					
Peternakan	22,40	11,19	31,33	5,47	24,08
Kehutanan	9,84	16,10	10,69	6,52	8,18
Perikanan	23,79	33,57	25,46	4,81	-3,72

Lampiran 16

Tabel Indeks Harga Implisit Sub Sektor Pertanian Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004

Sektor Pertanian	Tahun				
	2000	2001	2002	2003	2004
Tabama	359,67	387,63	414,42	418,82	437,08
Tanaman Perkebunan	217,67	250,02	283,09	299,03	300,11
Peternakan	291,66	292,22	329,12	363,27	384,59
Kehutanan	346,08	371,65	384,56	422,59	495,42
Perikanan	200,73	233,13	271,94	277,33	303,12

Lampiran 17

Tabel Laju Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian Kabupaten Kudus ADHK 2000 pada Tahun 2000-2004 (%)

Sektor Pertanian	Tahun					Rata-rata (gi)	$(1+g_{ij})/(1+g_j)$
	2000	2001	2002	2003	2004		
Tabama	23,75	11,00	9,33	6,25	9,48	11,96	0,93
Tanaman Perkebunan	29,07	17,70	14,40	12,32	7,45	16,19	1,23
Peternakan	22,40	11,17	27,76	4,39	18,26	16,80	1,28
Kehutanan	9,84	14,99	9,62	5,34	5,71	9,10	0,73
Perikanan	23,79	28,90	18,79	3,48	-2,46	14,50	1,11

Lampiran 18

Tabel Laju Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah ADHK 2000 pada Thun 2000-2004 (%)

Sektor Pertanian	Tahun					rata-rata (Gi)	$(1+G_{ij})/(1+G_j)$
	2000	2001	2002	2003	2004		
Tabama	-	0,36	5,67	-0,18	5,64	2,87	1,16
Tanaman Perkebunan	-	1,48	-2,65	-2,20	7,06	0,92	0,58
Peternakan	-	1,63	9,52	-5,98	0,70	1,47	0,74
Kehutanan	-	-3,32	5,75	-40,84	32,96	-1,36	-0,11
Perikanan	-	10,09	0,50	-2,25	1,96	2,58	1,07

Lampiran 19

Tabel Nilai DLQ Sub Sektor Pertanian Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004

Sektor Pertanian	Nilai DLQ	Keterangan
Tabama	0,33	non basis
Tanaman Perkebunan	45,08	basis
Peternakan	15,40	basis
Kehutanan	-13255,96	non basis
Perikanan	1,21	basis

Lampiran 20

Tabel Angka Pengganda Pendapatan dan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Perekonomian Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004

Tahun	Y	YP	MS	▲YP	▲Y
2000	7430608,48	323476,80	22,97		
2001	10093486,90	391282,47	25,80	67805,67	1749108,95
2002	12616399,78	485864,95	25,97	94582,48	2456012,40
2003	16130789,46	533657,71	30,23	47792,76	1444624,40
2004	18577048,92	627115,13	29,62	93457,42	2768491,69

Lampiran 21

Tabel Angka Pengganda Tenaga Kerja Kerja dan Kontribusi Tenaga Kerja Sektor Pertanian terhadap Total Tenaga Kerja di Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004

Tahun	N	NP	K	▲NP	▲N
2000	366144,00	61702,00	5,93		
2001	381176,00	61865,00	6,16	163,00	1004,31
2002	366892,00	68765,00	5,34	6900,00	36814,58
2003	354842,00	57411,00	6,18	-11354,00	-70176,03
2004	357752,00	57835,00	6,19	424,00	2622,75

Lampiran 22

Tabel Gabungan LQ dan DLQ Sektor Perekonomian Kabupaten Kudus

Lapangan Usaha	Rata-Rata LQ	Nilai DLQ	Keterangan
Pertanian	0,17	28,4	Non Basis-Basis
Pertambangan dan Penggalian	0,03	0,24	Tetap Non Basis
Industri Pengolahan	1,86	0,37	Basis-Non Basis
Listrik, Gas dan Air Bersih	1,40	14,71	Tetap Basis
Bangunan	0,17	0,06	Tetap Non Basis
Perdagangan, hotel dan restoran	1,29	9,9	Tetap Basis
Angkutan dan Komunikasi	0,41	1,41	Non Basis-Basis
Keuangan, Persewa dan Jasa Perusahaan	0,78	16,29	Non Basis-Basis
Jasa-Jasa	0,28	0,03	Tetap Non Basis

Lampiran 23

Tabel Gabungan LQ dan DLQ Sub Sektor Pertanian Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004

Sektor Pertanian	Rata-Rata LQ	Nilai DLQ	Keterangan
Tabama	1,02	0,33	Basis-Non Basis
Tanaman Perkebunan	1,25	45,08	Tetap Basis
Peternakan	0,37	15,4	Non Basis-Basis
Kehutanan	0,03	-13255,96	Tetap Non Basis
Perikanan	0,06	1,21	Non Basis-Basis